



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 akan fokus pada pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan diselaraskan dengan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, RPD Tahun 2024-2026, RENSTRA Tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada kebijakan, **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**, dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis;
- b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
- c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter.

Prioritas daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sesuai RPJMD, dan juga dalam rangka untuk membangun sinergi, keselarasan, kerja sama, kolaborasi, dan sinkronisasi antarsektor agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.

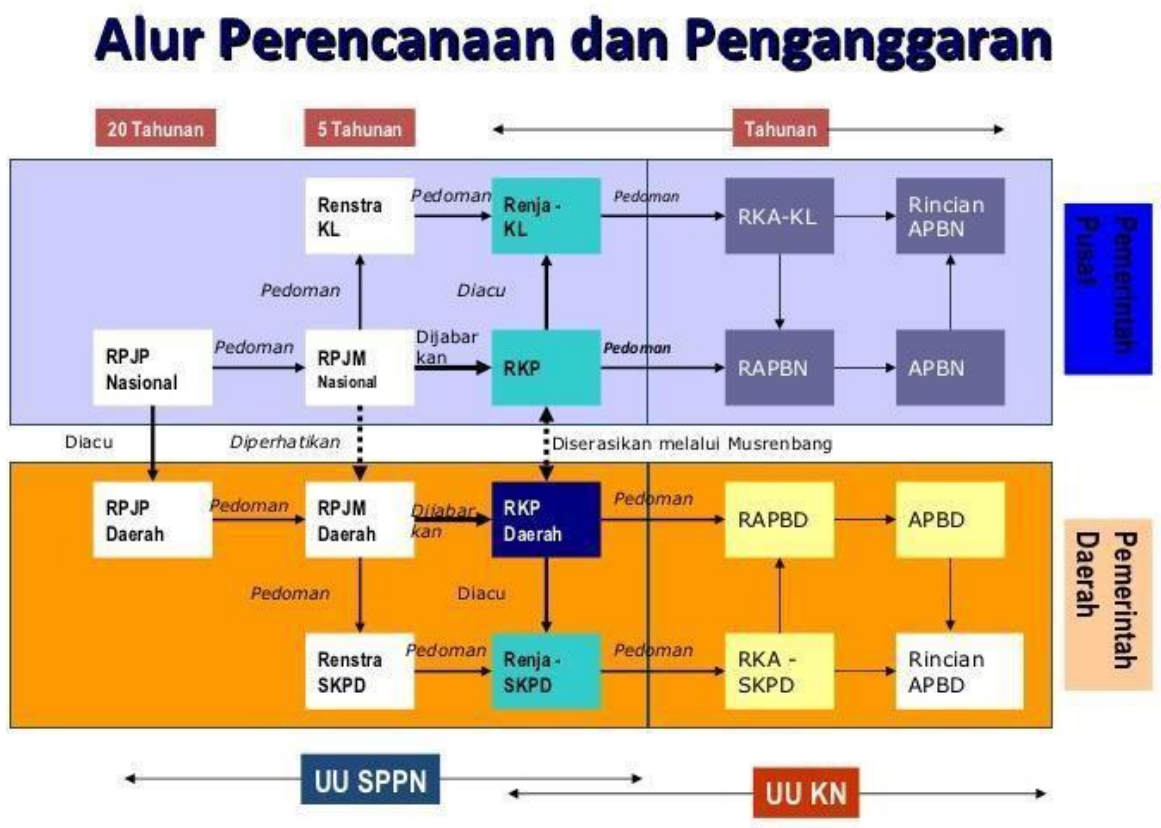
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
- 2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1

Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 87);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

24. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/0002829 tanggal 10 April 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor S/000.7.2.5/509/2025 Tahun 2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas beserta indikasi, pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

BAB V P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun kedepan mengacu pada sasaran strategis seperti yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Adapun Sasaran Strategis tersebut meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun);
2. Meningkatnya produksi garam, dengan indikator sasaran : produksi garam (ton/tahun);
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikator sasaran: angka konsumsi ikan (angka);
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan, dengan indikator sasaran : nilai tukar nelayan (angka);
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan indikator sasaran : nilai tukar pembudidaya ikan (angka);
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif dengan indikator sasaran : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%);
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat (angka);
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran : Indeks manajemen risiko (angka).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya 8 (delapan) sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang didalamnya berisi beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Guna memastikan agar capaian kinerja dan pelayanan tetap berjalan optimal sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dituangkan pada Tabel.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pilihan										
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	n/a	1,5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	n/a	87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan	Ton	2.859.106	855.734,92	927.350	968.353,80	104,42	968.353,80	952.718	100
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	41,74	38,83	40,12	40,12	100	40,12	40,92	100
		Produksi Garam	Ton	403.920	595.984,41	133.320	629.952,95	472,51	629.952,95	134.640	100
		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Angka	1	n/a	1	1	100	1	1,1	100
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108,05	n/a	107,78	104,82	97,25	104,82	108,05	100
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	106	n/a	105	101,4	96,57	101,4	105,5	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	112	n/a	110	107,35	97,59	107,35	110,5	100
		Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0,79	n/a	0,75	0,75	100	0,75	0,79	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	64	n/a	62	62	100	62	63	100
		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83	n/a	82	82	100	82	83	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	n/a	83	90,75	109,33	90,75	84	100
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	84	n/a	82	2,69	3,28	2,69	2,6	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	n/a	5	3,7	74	3,7	5	100
		Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,54	n/a	108,27	101,41	93,66	101,41	108,54	100
		Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	n/a	44,44	44,44	100	44,44	50	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	100	72	72	100	72	72	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	100	72,72	72,72	100	72,72	72,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	90,91	81,82	90,91	111,11	90,91	81,82	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	70	100	70	70	100	70	70	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71,72	81,82	62,62	72,72	116,13	72,72	71,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	100	81	81	100	81	81	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72,72	63,64	63,63	90,9	142,86	90,9	72,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending	%	63	100	63	63	100	63	63	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	100	72	72	100	72	72	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil										
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	n/a	320.586,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	10.000	n/a	10.100	10.100	100	10.100	4.100	100
		Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Unit	4	n/a	3	3	100	3	4	100
		Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	343.717,50	n/a	327.350	410.642	125,44	410.642	343.717,50	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	n/a	452	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	280	n/a	240	525	218,75	525	280	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0,25	n/a	0,25	0	0	0	0,25	100
		Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	n/a	1	2	100	2	1	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										
		Jumlah Pelayanan	Jenis	n/a	11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	%		100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Jenis		8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	%		85,45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	%		50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tawang Kelas B)	%		40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Morodemak Kelas A)	%		50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Jenis		11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Jenis	n/a	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	%	n/a	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Lohgending Kelas A)	%	n/a	50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Larangan Kelas B)	%	n/a	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Larangan Kelas B)	Jenis	n/a	11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tegalsari Kelas A	%	33	n/a	16	16	100	16	33	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tegalsari Kelas A	%	70	n/a	60	60	100	60	70	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tegalsari Kelas A	%	90	n/a	85	85	100	85	90	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tegalsari Kelas A	%	30	n/a	15	15	100	15	30	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Asemdayong Kelas B	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Asemdayong Kelas B	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Asemdayong Kelas B	%	20	n/a	14	14,58	102	14,58	20	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketampilannya PPP Asemdayong Kelas B	%	30	n/a	20	20	100	20	30	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Wonokerto Kelas B	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Wonokerto Kelas B	%	28	n/a	14	14	100	14	28	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Wonokerto Kelas B	%	42	n/a	39	57,69	147,92	57,69	42	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Wonokerto Kelas B	%	16,22	n/a	5	44,32	300	44,32	16,22	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketampilannya PPP Wonokerto Kelas B	%	25	n/a	9	81,82	300	81,82	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A	Jenis	6	n/a	6	6	100	6	6	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	5	100	5	10	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Klidanglor Kelas A	%	60	n/a	50	100	200	100	60	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	5	100	5	10	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	50	300	50	10	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tawang Kelas B	%	25	n/a	18	36	200	36	25	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tawang Kelas B	%	7	n/a	6	9	150	9	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tawang Kelas B	%	50	n/a	46	47	102,17	47	50	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tawang Kelas B	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	7	n/a	6	7	116,67	7	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	5	n/a	4	4	100	4	5	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Morodemak Kelas A	%	57	n/a	42	42	100	42	57	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Morodemak Kelas A	%	66	n/a	55	55	100	55	66	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Morodemak Kelas A	%	14	n/a	7	14	200	14	14	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Bajomulyo Kelas A	%	14	n/a	6	6	100	6	14	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Bajomulyo Kelas A	%	90	n/a	85	100	117,65	100	90	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Bajomulyo Kelas A	%	68	n/a	65	65	100	65	68	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	43	n/a	29	29	100	29	43	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	6	n/a	5	5	100	5	6	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tasikagung Kelas A	%	57,14	n/a	42,86	42,86	100	42,86	57,14	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tasikagung Kelas A	%	35	n/a	25	85,34	300	85,34	35	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tasikagung Kelas A	%	7,4	n/a	3,7	4	108,11	4	7,4	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	5	n/a	5	6	120	6	5	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	3	n/a	3	4	133,33	4	3	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Karimunjawa Kelas B	%	50	n/a	40	40	100	40	50	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Karimunjawa Kelas B	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Karimunjawa Kelas B	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Karimunjawa Kelas B	%	70	n/a	65	65	100	65	70	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Lohgending Kelas A	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Lohgending Kelas A	%	54	n/a	54	54	100	54	54	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis		n/a	5	5	100	5		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis		n/a	3	3	100	3		
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Larangan Kelas B	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Larangan Kelas B	%	45	n/a	40	40	100	40	45	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Larangan Kelas B	%	9	n/a	7	20	285,71	20	9	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Larangan Kelas B	%	32	n/a	30	30	100	30	32	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan produksi benih	%	n/a	25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	n/a	0,4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Produksi perikanan budidaya	Ton	609.000	n/a	600.000	554.810,13	92,47	554.810,13	609.000	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,55	n/a	111,27	131,6	118,27	131,6	111,55	100
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	n/a	26	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	127	n/a	117	127	108,55	127	127	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										
		Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (BLPKIL Kelas A)	Kasus	n/a	300	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (BLPKIL Kelas A)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	535.148,31	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	29	n/a	29	29	100	29	29	100
		Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	n/a	350	362	103,43	362	350	100
		Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	n/a	2	2	100	2	3	100
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	60	n/a	60	60	100	60	60	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat										
		Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	n/a	9	9	100	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										
		Persentase peningkatan produksi garam	%	n/a	37,99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi garam	%	2	n/a	1	1	100	1	2	100
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	n/a	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	17,6	5	5	100	5	5	100
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	n/a	38,63	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	n/a	38,99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)	%	n/a	1,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	n/a	30,43	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	n/a	3,7	3,7	100	3,7	4	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2,93	n/a	1,39	2,56	184,17	2,56	2,93	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7,8	n/a	3,7	3,7	100	3,7	7,8	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil										
		Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	n/a	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah perempuan dan taruna	Kelompok	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		pesisir yang berkembang skala usaha nya									
		Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	n/a	5	8	160	8	5	100
		Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	n/a	25	55	220	55	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Unit	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	n/a	4	5	125	5	4	100
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Barat)	Ha	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Timur)	Ha	n/a	3,95	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Selatan)	Ha	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Unit	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi CDK Wilayah Barat	Ha	2,2	n/a	2	2	100	2	2,2	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Barat	Lokasi	2	n/a	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Selatan	Ha	2,2	n/a	2	3,68	184	3,68	2,2	100
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Timur	Ha	2,2	n/a	2	2	100	2	2,2	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Timur	Lokasi	2	n/a	2	2	100	2	2	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Barat)	Dokumen	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Timur)	Dokumen	n/a	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Selatan)	Dokumen	n/a	13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	n/a	72	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	%	n/a	45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang- undangan	%	70	n/a	70	73	104,29	73	70	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	n/a	61	61	100	61	61	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	n/a	61	64,5	105,74	64,5	61	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	n/a	61	61	100	61	61	100
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	n/a	271	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	n/a	45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Barat)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Timur)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	n/a	100	120	120	120	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	n/a	18	46	255,56	46	18	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	n/a	35	40	114,29	40	35	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Barat	Kali	10	n/a	10	10	100	10	7	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Selatan	Kali	10	n/a	10	10	100	10	10	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Timur	Kali	10	n/a	10	10	100	10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum	Kasus	n/a	54	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Barat)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Timur)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	n/a	180	190	105,56	190	180	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Barat									
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	n/a	37,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	n/a	72,9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160.800	n/a	160.000	299.838,50	187,4	299.838,50	160.800	100
		Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	n/a	4	4	100	4	4	100
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	n/a	9.524	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	n/a	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	n/a	20	20,69	103,45	20,69	20	100
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	n/a	78.399,21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tegalsari Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Asemdayong Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Wonokerto Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Klidanglor Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tawang Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Morodemak Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Bajomulyo Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Karimunjava Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Lohgending Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BLPKIL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BBIAPL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Larangan Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPMHP Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)									
		Jumlah laporan pelaksanaan	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tegalsari Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Asemdayong Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Wonokerto Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Klidanglor Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tawang Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Morodemak Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Karimunjawa Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Lohgending Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BLPKIL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	n/a	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	0	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)									
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tegalsari Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Asemdayong Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Wonokerto Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Klidanglor Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tawang Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal PPP Morodemak Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Bajomulyo Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tasikagung Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Karimunjawa Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Lohgending Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BLPKIL Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BBIAPL Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Larangan Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Barat	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Selatan	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Timur	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPMHP Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Program - program yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026. Adapun program-program yang ditetapkan meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam mengukur capaian kinerja i ke 6 (enam) Program yang ditetapkan kemudian ditentukan indikator utama pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Persentase produksi perikanan tangkap
 - b) Indeks harga yang diterima oleh nelayan
 - c) Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya
 - d) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari
 - e) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong
 - f) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto
 - g) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor
 - h) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang
 - i) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak
 - j) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo
 - k) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung
 - l) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimun Jawa
 - m) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending
 - n) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan
 - b) Persentase produksi ikan konsumsi air laut
 - c) Produksi perikanan budidaya
 - d) Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - a) Persentase produksi garam
 - b) Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
 - c) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - d) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - e) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Jumlah produksi olahan ikan
 - b) Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - a) Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - c) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - d) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - e) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - f) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur
 - g) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah
 - b) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
 - c) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tegalsari Kelas A)
 - d) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Asemdayong Kelas B)
 - e) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Wonokerto Kelas B)
 - f) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Klidanglor Kelas A)
 - g) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tawang Kelas B)
 - h) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Morodemak Kelas A)
 - i) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)
 - j) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tasikagung Kelas A)
 - k) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)
 - l) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Lohgending Kelas A)
 - m) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BLPKIL Kelas A)

- n) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BBIAPL Kelas A)
- o) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Larangan Kelas B)
- p) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)
- q) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)
- r) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)
- s) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPMHP Kelas A)

Target indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan tahun 2025 serta realisasi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 serta proyeksi capaian tahun 2025 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase produksi perikanan tangkap			5	5	74	100	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan			108,27	108,54	93,66	100	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya			44,44	50	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari			72	72	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong			72,72	72,72	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto			81,82	81,82	111,11	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor			70	70	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang			62,62	71,72	116,13	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak			81	81	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa			63,63	72,72	142,86	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending			63	63	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan			72	72	100	100	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan			100	100	100	100	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut			5	5	100	5	
	Produksi perikanan budidaya			554.810,13	609.000	92,47	609.000	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya			131,6	111,55	118,27	111,55	
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase produksi garam			3	2	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif			n/a	5	100	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			4,5	4	100	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			4,61	2,93	184,17	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			12,3	7,8	100	100	
IV	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan			70	70	104,29	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			61	61	100	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			61	61	105,74	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			61	61	100	100	
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Jumlah produksi olahan ikan			160.000	160.800	187,4	100	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan			4	4	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tegalsari Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Asemdayong Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Wonokerto Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Klidanglor Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tawang Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Morodemak Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tasikagung Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BBIAPL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Larangan Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPMHP Kelas A)			100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka kami uraikan sebagai berikut:

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

2. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

3. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

b) Tantangan

1. Optimalisasi hasil kelautan dan perikanan terutama pada usaha skala kecil dan menengah;
2. Rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir;
3. Digitalisasi sektor kelautan dan perikanan;
4. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan;
5. Keterbatasan infrastruktur dan penyedia logistik di sentra perikanan;
6. Keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan;
7. Fasilitasi kemudahan perijinan;
8. Produksi komoditas unggulan perikanan budidaya di Jawa Tengah;
9. Inovasi, diseminasi dan pendampingan teknologi di Jawa Tengah;
10. Produksi garam yang masih bergantung cuaca, serapan pasar ke garam rakyat masih rendah;
11. Rekomendasi perijinan ruang laut;
12. Pengelolaan kawasan konservasi.

c) Peluang

1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM;
4. Pengembangan infrastruktur.

d) Formulasi isu-isu penting

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan berpotensi memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan dan garam rakyat;
3. Masih rendahnya Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum optimalnya perlindungan usaha;
4. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah yang masih dibawah rata-rata Angka Konsumsi Ikan Nasional dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, rendahnya kompetensi sdm poklalsar, belum optimalnya jaminan mutu produk perikanan serta belum terbentuknya jejaring pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dikarenakan minimnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bagi hasil yang tidak proporsional, praktik ijon, serta belum optimalnya jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha;
6. Terjadinya *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* data produksi perikanan, serta minimnya teknologi penangkapan ikan;

7. Tingginya harga pakan, wabah dan hama penyakit ikan, menurunnya kualitas benih dan induk, rendahnya teknologi serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
8. Kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, alih fungsi lahan, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan SDKP, serta adanya ketidaksesuaian antara rencana alokasi ruang laut dengan pemanfaatan ruang laut;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Reviu tersebut tertuang dalam tabel 5 berikut :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	453.691.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	453.691.000
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	49.277.557.000			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	49.277.557.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.444.788.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.444.788.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	644.022.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	644.022.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	507.428.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	507.428.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	381.904.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	381.904.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	457.676.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	457.676.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	756.170.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	756.170.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	463.378.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	463.378.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	491.265.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	491.265.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.220.856.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.220.856.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	442.160.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	442.160.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	667.879.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	667.879.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	742.039.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	742.039.000
		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	4.390.153.000		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	4.390.153.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	596.473.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	596.473.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	513.636.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	513.636.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	406.687.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	406.687.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
		Bidang Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	354.029 Ton	4.585.278.000		Bidang Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	354.029 Ton	4.585.278.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100%	230.988.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100%	230.988.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100%	1.381.613.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100%	1.381.613.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100%	204.283.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100%	204.283.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91%	1.116.347.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91%	1.116.347.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100%	577.223.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100%	577.223.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100%	91.400.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100%	91.400.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100%	127.772.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100%	127.772.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100%	92.096.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100%	92.096.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100%	633.497.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100%	633.497.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100%	88.778.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100%	88.778.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100%	119.301.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100%	119.301.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
		Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17%	491.310.000		Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17%	491.310.000
			Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25%	274.068.000			Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25%	274.068.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07%	200.732.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07%	200.732.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16%	184.824.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16%	184.824.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19%	230.977.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19%	230.977.000
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70%	952.991.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70%	952.991.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17%	58.212.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17%	58.212.000
			Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72%	182.011.000			Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72%	182.011.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	56.960.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	56.960.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	103.390.000			Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	103.390.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17%	64.710.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17%	64.710.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61%	244.953.000			Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61%	244.953.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	5.812.544.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	5.812.544.000
		Balai Pengembangan Budidaya Ikan	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5%	6.530.616.000		Balai Pengembangan Budidaya Ikan	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5%	6.530.616.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100%	268.890.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100%	268.890.000
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Angka Konsumsi Ikan	17.71 Kg/Kapita/Tahun	637.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Angka Konsumsi Ikan	17.71 Kg/Kapita/Tahun	637.000.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4%	363.072.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4%	363.072.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap / Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang	Produksi Perikanan Tangkap	20 Paket	Hibah Aspirasi
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan / Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Kebumen	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	1 Paket	Hibah Aspirasi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kota Magelang	Produksi Perikanan Budidaya	51 Paket	Hibah Aspirasi
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang	Angka Konsumsi Ikan	4 Paket	Hibah Aspirasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 :

- Visi Pembangunan Nasional
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
- Misi Presiden
 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Program Prioritas Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang relevan mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air, ekonomi biru;
2. Reformasi politik, hukum , dan birokrasi;
3. Pemberantasan kemiskinan;
4. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan Internasional;
6. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

- 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 8. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 9. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim

b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Kelautan (RPJMN 2025-2029)

Arah kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Nasional Kelautan tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Rancangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KKP 2025-2029			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	 Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	 Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana	 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	 Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan	 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif	 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan perikanan
	 Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan	 Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan	 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
	 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
	 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas	 Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik	 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
- c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. Menjadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)		Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Angka	2
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Ton	541.775,75
			Produksi Perikanan	Ton	954.029
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	84
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3,13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)		Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	(%)	66,88
		Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	(%)	0,84

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026. Rencana tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan									63.864.762.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	84		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								63.411.071.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85	63.411.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63.411.071.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	742.039.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.804.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	21.804.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.948.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.056.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.800.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.855.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	654.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	303.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.555.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	65.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	4.390.153.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.257.153.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	4.257.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				505.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.748.653.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.748.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	596.473.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.367.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	19.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.400.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.467.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12.467.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.433.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.272.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				490.161.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	490.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.673.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	39.673.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.815.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.858.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	513.636.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.554.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.012.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.042.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.972.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	271.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.472.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	241.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					224.110.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	224.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.110.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	406.687.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.935.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	16.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.774.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.161.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					357.372.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	357.372.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.200.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				322.172.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	322.172.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	32.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.080.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	49.277.557.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.977.993.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	43.977.993.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.055.093.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252	43.055.093.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				851.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	851.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				71.500.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	71.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					136.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	136.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	16.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.251.710.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.251.710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				115.140.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	115.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.490.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	164.490.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				154.080.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	154.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				57.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	57.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	650.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	72.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.673.854.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.673.854.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.792.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	390.792.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.277.062.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.277.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.063.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.063.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				290.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	290.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	142.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				450.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				181.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	181.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	644.022.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.134.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	32.134.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.974.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.974.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.750.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.410.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.336.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	543.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				479.236.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	479.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.552.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	68.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.409.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.143.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	1.444.788.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	73.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.960.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	9.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.226.908.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.226.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.468.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.023.640.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.023.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	143.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.920.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	64.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	1.220.856.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.200.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.061.156.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.061.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				203.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	203.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.676.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	855.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	109.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	491.265.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	25.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.800.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	432.960.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				391.460.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	391.460.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.005.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	33.005.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.875.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	12.875.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.130.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.130.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	507.428.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.252.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	36.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.896.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.896.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.356.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.876.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.876.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.346.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	121.346.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				288.330.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.330.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	60.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.100.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	756.170.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					529.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	529.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				37.350.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				491.520.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	491.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	185.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	442.160.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.160.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.250.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.150.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.760.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	371.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.280.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				327.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	327.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.940.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.190.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.750.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	667.879.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.988.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.988.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.898.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.290.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.051.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				470.851.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470.851.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.840.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	69.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.140.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	32.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	%	100	381.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	44.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					287.654.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	287.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				248.454.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	248.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	49.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	464.676.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					382.176.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	382.176.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				331.296.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	331.296.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	463.378.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.830.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.830.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.980.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.048.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	387.048.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				356.048.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	356.048.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	57.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	25.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								453.691.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3.13	453.691.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						453.691.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	453.691.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.691.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	453.691.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				208.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	208.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				195.691.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	195.691.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	180	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)									616.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	66.88		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi								616.533.000		
						Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	%	0.84	616.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						616.533.000		
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0.07	200.732.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					200.732.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	2	200.732.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				48.898.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	4253.6	48.898.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				151.834.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	151.834.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0.16	184.824.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					184.824.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	1	184.824.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				10.506.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	288.98	10.506.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				174.318.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	174.318.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0.19	230.977.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					230.977.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	3	230.977.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				87.930.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	772.78	87.930.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				143.047.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	143.047.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)									25.842.303.000		
						Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	%	2			
	Meningkatnya Produksi Perikanan								25.842.303.000		
						Produksi Garam	Ton	541775.75	491.310.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						491.310.000		
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50.17	491.310.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					491.310.000		
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	10	70.245.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				70.245.000		
						Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	70.245.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Kelompok	10	421.065.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0005			Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman				421.065.000		
						Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	10	421.065.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	954029	25.350.993.000		
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						274.068.000		
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	274.068.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					274.068.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	200.000.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				200.000.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	750.3	200.000.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Lokasi	5	74.068.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0006			Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir				74.068.000		
						Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	4	74.068.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						9.771.576.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	1.381.613.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.381.613.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	72.051.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				72.051.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	72.051.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.309.562.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.309.562.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	29	1.309.562.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	230.988.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					230.988.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	74.710.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.710.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	74.710.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Unit	1	156.278.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				156.278.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	12	156.278.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	633.497.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					633.497.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	9725	192.182.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				192.182.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	18	192.182.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	441.315.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				441.315.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	26	441.315.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	92.096.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					92.096.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	950	40.226.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.226.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	10	40.226.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.870.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.870.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	22	51.870.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	204.283.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					204.283.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	800	117.158.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				117.158.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	117.158.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	2	87.125.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				87.125.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	23	87.125.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	91.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					91.400.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4050	67.400.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				67.400.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	11	67.400.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	24.000.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	88.778.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					88.778.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	150	36.967.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.967.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	14	36.967.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.811.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.811.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	14	51.811.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	119.301.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					119.301.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	52	11.933.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				11.933.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	16	11.933.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	107.368.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				107.368.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	25	107.368.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; KEBUMEN --> AYAH --> DESA AYAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	1.116.347.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.116.347.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4500	61.090.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				61.090.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	61.090.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.055.257.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.055.257.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	1.055.257.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	570.223.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					570.223.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	50	285.420.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				285.420.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	17	285.420.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	kg/kapita/tahun	1	284.803.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				284.803.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	17	284.803.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	127.772.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					127.772.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	1200	126.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				126.252.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	126.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.520.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	24	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	5.115.278.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					4.677.175.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Data	30	44.100.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				44.100.000		
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	44.100.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
						Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Orang	30	1.347.850.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0010			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.347.850.000		
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	30	1.347.850.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Orang	10000	3.285.225.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				3.285.225.000		
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	3.285.225.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					260.035.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	1000	260.035.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.03.0004			Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				260.035.000		
						Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	%	100	260.035.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					178.068.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	178.068.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.06.0001			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				178.068.000		
						Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	11	178.068.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						13.272.050.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	268.890.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					268.890.000		
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	450	220.325.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		3.25.04.1.05.0011			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				220.325.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	3	220.325.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Unit	40	48.565.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	
		3.25.04.1.05.0013			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				48.565.000		
						Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35	48.565.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	9.230.616.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					476.560.000		
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	476.560.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				105.200.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	105.200.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				371.360.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	371.360.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					8.754.056.000		
						Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Jenis	1	4.648.168.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.648.168.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	27	4.648.168.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Lokasi	9	4.105.888.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0004			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.105.888.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	4.105.888.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	3.772.544.000		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					112.548.000		
						Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Jenis	3	43.358.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				43.358.000		
						Jumlah Pembudidaya	Orang	30	43.358.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Orang	10	69.190.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0001			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				46.050.000		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	46.050.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				23.140.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	23.140.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					3.659.996.000		
						Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	3.659.996.000		
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.659.996.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	3.659.996.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						983.227.000		
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	182.011.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					182.011.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	75	182.011.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				182.011.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	12	182.011.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	103.390.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					103.390.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	103.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				103.390.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	8	103.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	244.953.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					244.953.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	244.953.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				244.953.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	10	244.953.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	58.212.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					58.212.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	10.061.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.061.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	10.061.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	48.151.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.416.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.416.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.500.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.500.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				3.570.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	3.570.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				37.665.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	37.665.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	56.960.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					56.960.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	3.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				3.870.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	3.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	%	80	53.090.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				2.610.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	1	2.610.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.610.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.610.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				47.870.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	47.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	64.710.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					64.710.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	3	4.410.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				4.410.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	4.410.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	60.300.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.700.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.700.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.105.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.105.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				51.390.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	2	51.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	272.991.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					219.261.000		
						Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Orang	50	42.020.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				42.020.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	42.020.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	%	90	177.241.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				56.784.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	3	56.784.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				101.310.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	101.310.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0018			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah				19.147.000		
						Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	19.147.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					53.730.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	90	35.820.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	%	90	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

						Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya					
		3.25.05.1.02.0004			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.050.072.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahu	17.71	687.000.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah Produk Olahan Ikan	Ton	161604	50.000.000		
		3.25.06.1.01.0004			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	50.000.000		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					635.000.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Orang	2000	635.000.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				635.000.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	10	635.000.000		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					2.000.000		
						Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Kegiatan	1	2.000.000		
		3.25.06.1.03.0004			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku				2.000.000		
						Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	981000	2.000.000		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	363.072.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					82.037.000		
						Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Unit	85	82.037.000		
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				82.037.000		

						Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	105	82.037.000		OPD Provinsi
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					281.035.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Dokumen	550	281.035.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				281.035.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	575	281.035.000		OPD Provinsi
JUMLAH									90.323.598.000		

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan
Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Pelayanan kepelabuhan tidak maksimal	12	Tidak tersedianya sarpras dan pelayanan yang kurang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	Peningkatan pelayanan serta sarpras penunjang pelayanan, Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala PPP Logending	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi Loka PBI Karimunjawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana Produksi	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak	12	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	12	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	Menugaskan SDM yang ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan untuk menambah kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan pelabuhan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	12	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	Melakukan pemberian teguran, peringatan, dan sanksi berupa pembongkaran lahan bagi penyewa lahan yang melanggar peraturan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi	Pemantauan dan pendampingan pada saat pelaksanaan penanaman mangrove	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Survei lokasi sebelum dilakukan penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	12	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	Sosialisasi dan monitoring serta evaluasi thd kepatuhan pelaku usaha	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong seperti fasilitas untuk Tambat dan labuh Kapal Nelayan	12	Sedimentasi di kawasan dermaga pelabuhan dan muara Sungai	Kapal-kapal tidak dapat merapat ke dermaga dan kapasitas dermaga kurang maksimal untuk menampung jumlah kapal yang tambat di pelabuhan	Mengusulkan perbaikan Fasilitas Pokok atau Fasilitas Fungsional	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong, seperti Drainase yang rusak parah dan kebersihan kawasan PPP Asemdayong masih banyak yang kumuh	16	Kerusakan parah drainase di kawasan pelabuhan, dan Sampah yang menumpuk di kawasan Pelabuhan	Saluran pembuangan air tidak lancar, dan Lingkungan menjadi kotor dan berbau,	Mengusulkan upaya perbaikan drainase kawasan pelabuhan dan mengusulkan jasa tenaga kebersihan kawasan pelabuhan	Kepala Pelabuhan	Desember 2027
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan Pemeliharaan BMD	12	Terbatasnya jumlah anggaran pemeliharaan yang terbilang sangat minim	Keterlambatan pemeliharaan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas barang milik daerah.	Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan prioritasnya untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan pada waktu yang tepat.	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	12	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kawasan PPP Wonokerto, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman nelayan/pemilik kapal mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan kapal	Kerugian ekonomi, kecelakaan kerja yang fatal, peningkatan biaya operasional, penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan citra buruk pelabuhan	1. Meningkatkan edukasi dan pelatihan keselamatan kerja bagi nelayan, buruh, dan pemilik kapal secara rutin. 2. Menambah fasilitas keselamatan dan keamanan, seperti jalur evakuasi, APAR, dan sistem peringatan dini. 3. Membangun koordinasi lintas sektor (UPTD PPP, TNI AL, Polair, Dinas Kesehatan, dan masyarakat nelayan).	Kepala PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.
						4. Menerapkan SOP keselamatan pelabuhan secara ketat dengan pengawasan rutin. 5. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital (CCTV, aplikasi laporan cepat) untuk memantau kondisi lapangan.		

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko tidak terbitnya dokumen kapal perikanan berupa STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Berlayar (PB) yang dapat menghambat operasional kapal dan menurunkan kepatuhan administrasi pelabuhan.	12	Masih banyaknya kapal perikanan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) tidak ramah lingkungan	Tidak terbitnya STBL Kedatangan Kapal dan PB	Kolaborasi dengan: 1. Syahbandar Perikanan : menertibkan dokumen kapal perikanan; 2. Petugas kesyahbandaran dan pengawas perikanan: menertibkan kelengkapan dokumen administrasi kapal perikanan dan menjaga keselamatan pelayaran kapal perikanan	Kepala PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	12	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaa API ramah lingkungan	Jika ada patroli pengawasan maka akan tertangkap	Kolaborasi dengan: 1. PSDKP (Pekalongan dan CDK Wil. Barat): melakukan patroli pengawasan bersama; 2. Sat POLAIRUD Pekalongan : melakukan penindakan kapal perikanan yang melanggar peraturan; 3. Posal Wonokerto : melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan	Kepala PPP Wonokerto	paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	12	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas kepelabuhanan tidak dapat dimanfaatkan	Kolaborasi dengan: 1. BPKAD Prov. Jateng : penghapusan aset mangkarak; 2. DKP Prov. Jateng : pembangunan kembali aset yang telah dihapuskan	Kalabuh PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilita si, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,U KL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,) /Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KK PR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Pelaku usaha memperluas lahan yang disewa tapa ijin Kepala Pelabuhan	12	Kurangnya pengawasan di lapangan	Kehilangan potensi PAD	Bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi untuk engeksekusi lahan-lahan yang dimanfaatkan secara ilegal	Kepala PPN Tasikagung	Semester 1

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan wilayah kerja operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	Kurangnya sapras (fasilitas pokok, penunjang, fungsional) yang memadai dalam pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan dan kejelasan batas wilayah kerja operasional pelabuhan, adanya bangunan liar di kawasan pelabuhan	Pengawasan operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	Pembangunan gedung pengawasan SAR, Rehabilitasi tempat istirahat nelayan, Review masterplan Pelabuhan, Ukur ulang batas tanah kawasan pelabuhan	Kepala PPP Logending	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Kapal nelayan yang beroperasi tidak memiliki dokumen yang lengkap	12	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya kelengkapan dokumen yang dimiliki	Nelayan tidak terlindungi secara hukum dan asuransi, nelayan terhambat dalam mengakses bantuan dari pemerintah	Sosialisasi serta rembug gayeng stake holder	Kepala PPP Logending	Desember
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	12	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Kasubag TU	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi di Loka PBI Karimunjawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaiki Sarana dan Prasarana Produksi	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya Produksi Benih Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	10	Turunnya Produktifitas Induk Ikan Endemik di Loka PBI Ngrajek	Target produksi ikan tidak tercapai	Melakukan Peremajaan Calon Induk Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Sarana dan Prasarana Revitalisasi Tambak Dinas DKP Prov. Jateng di Kab Jepara dalam rangka Modelling Pembenihan Ikan Nila Salin	10	Sarana dan Prasarana kurang memenuhi standar untuk memproduksi benih ikan Nila Salin	Target produksi ikan tidak tercapai	Dilakukan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Tambak Dinas Untuk Memproduksi Benih Ikan Nila Salin	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ambarawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Randudongkal	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Singasari	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Tambaksogra	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Janti	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Muntilan	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Maribaya	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Sluke	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan udang	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ngrajek	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	12	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Mengajukan untuk diadakan kegiatan pengawasan dan penertiban nelayan di laut oleh instansi yang berwenang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	12	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	Menetapkan perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	12	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	Menetapkan pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	12	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Menetapkan penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	12	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrem, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	12	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja/Kematian	1. Pemantauan/mencari informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca Ekstrim	12	1. Genteng dan plafon mulai bocor 2. Tembok bangunan mulai retak 3. pagar dan komponen kusen material besi dan baja keropos	1. Dampaknya kinerja karyawan terhambat 2. keselamatan jiwa karyawan bisa terancam	1. menyusun RAB pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung kantor 2. berkoordinasi dengan subag Umum DKP	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2 bulan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	12	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA	Melakukan monitoring target biofisik dikawasan konservasi	Kepala cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah
Tahun 2026

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Pendirian SPBN milik BUMD JPEN di Kawasan nelayan	Melakukan verifikasi dan penerbitan surat permohonan rekomendasi pendirian SPBN oleh JPEN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap /Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil / Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
2	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Asuransi nelayan (Bantuan premi asuransi untuk nelayan skala kecil)	Bantuan Premi Asuransi Nelayan untuk 10.000 Orang @100.000 di 24 Lokasi Kab./Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap /Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil / Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	-
3	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	- Perbaikan Drainase dan Pengangkatan Ex. Kapal Kebakaran di Kawasan di PPN Tegalsari - Pengerukan Alur Kali Sambong PPP Klidanglor - Pengerukan Alur Kali Kutho PPP Tawang Dengan total Rp 571.448.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap / Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	-
4	Penghapusan Hutang Petani, Nelayan, UMKM	Penyelesaian Piutang TPI	Melakukan Proses Penghapusan Piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah- Proses penetapan SK Penghapusan piutang oleh Provinsi Jawa Tengah	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar (Sarana Prasarana Nila Salin)	- Modelling Pembenihan Nila Salin di Jepara dengan anggaran sebesar Rp.2.700.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat / Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	-
5	Penyediaan Benih yang berkualitas	Penyediaan Benih Calon Indukan	Penyediaan Benih Calon Indukan Rp. 528.013.000 - Revitalisasi sarana dan prasarana di Loka Budidaya dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat / Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	-
6	Pelatihan Pengolahan dan Manajemen Keuangan Bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan	Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan	Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Sebanyak 10 Kali Rp. 107.500.000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	-
		Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir (Manajemen Keuangan)	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir sebanyak 5 Kali Tema Materi Manajemen Keuangan Bagi Perempuan Pesisir Rp. 70.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
7	Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri Segoro untuk Mengamankan Garis Pantai	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Selatan	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 20.000 Batang di Wilayah CDK Selatan dengan anggaran Rp. 124.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	-

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Timur	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 25.000 Batang di Wilayah CDK Timur dengan anggaran Rp. 100.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	-
		Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Barat	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 23.700 Batang di Wilayah CDK Barat dengan anggaran Rp. 130.350.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	-
8	Pembelian Hasil Panen Nelayan oleh BUMD Pelatihan Petambak Garam, Penyuluhan /Pelatihan untuk Meningkatkan Kualitas Panen)	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat	1 Kegiatan Rp.5.520.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
		Bantuan Hibah Barang berupa Sarana dan Prasarana Petambak Garam	Hibah Sarana dan Prasarana Petambak Garam (Geomembran) Rp.400.000.000 untuk 10 Kelompok Petambak Garam	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penyusunan Renja Tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Dokumen perencanaan tahun 2026 utamanya RKPD 2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD 2026 merupakan dokumen yang cukup penting. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 - 2026, sehingga RKPD Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan risiko menjadi faktor penting bagi tercapainya tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan juga efektif serta efisien dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
Manajemen Risiko Perangkat Daerah

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Kematian ikan	Risiko Strategis	Adanya hama dan penyakit ikan	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Benih ikan tidak tumbuh berkembang	Risiko Strategis	Benih ikan tidak bermutu.	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembudidaya ikan, masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan tidak melaut	Risiko Strategis	Cuaca buruk dan tingginya biaya operasional melaut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Nelayan, pengolah dan pemasar ikan, masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan melaut semakin jauh	Risiko Strategis	Menurunnya Sumber Daya Ikan di laut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Nelayan, masyarakat
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Petambak garam tidak dapat memproduksi	Risiko Strategis	Tingginya curah hujan	Volume produksi garam turun	masyarakat, petambak garam, pemerintah
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Petambak garam tidak dapat memproduksi	Risiko Strategis	Proses produksi masih tradisional	Volume produksi garam turun	Masyarakat, petambak garam
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan lambat	Risiko Strategis	Personil OPD tidak memahami tugasnya	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	masyarakat, OPD
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan lambat	Risiko Strategis	Personil OPD tidak berorientasi pelayanan	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Masyarakat, OPD
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Kurang pemahaman identifikasi risiko	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi SPIP	Risiko tidak terkelola	OPD
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove yang ditanam	Risiko Strategis	Lokasi dan jenis tanah tidak sesuai	Ekosistem pesisir rusak	Masyarakat, OPD
11	Sasaran Strategis	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove yang ditanam	Risiko Strategis	Gangguan manusia	Ekosistem pesisir rusak	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	Risiko Strategis	Rendahnya integritas ASN	Tidak tercapainya target program/kegiatan	Pemda, OPD dan masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Capaian Kinerja Rendah	Risiko Operasional	Kapasitas SDM Kurang Memadai	Kinerja Perangkat Daerah Tidak Mencapai Target	PEMDA
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Populasi sumber daya ikan menurun	Risiko Operasional	Tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan rusak	Ikan hasil tangkapan nelayan sedikit	Pemerintah
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	Risiko Operasional	Pelayanan tidak terganggu	pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan di PPN Tegalsari	PPN Tegalsari dan stakeholder
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Target dan realisasi program kegiatan tercapai	Risiko Operasional	administrasi berjalan tertib dan lancar	Pelayanan tidak terganggu	PPN Tegalsari dan stakeholder
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada nelayan dan pengguna jasa pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten dan sarpras pelabuhan perlu perhatian khusus	Kualitas pelayanan yang kurang dapat menyebabkan penurunan kepuasan dan kepercayaan nelayan dan pengguna jasa pelabuhan perikanan	Pemilik kapal & ABK,

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kurangnya motivasi SDM dapat menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas.	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM yang ada di PPP Asemdayong	Penurunan reputasi perangkat daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam menarik investasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Pemilik kapal, nelayan dan Masyarakat PPP Asemdayong
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyebabkan penurunan kepuasan dan kepercayaan.	Risiko Operasional	Kurangnya kompetensi SDM dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang optimal.	Penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan partisipasi dan kerjasama.	PPP Asemdayong, Masyarakat
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kurangnya anggaran yang dapat menyebabkan kesulitan dalam membiayai kegiatan.	Risiko Operasional	Tersedianya anggaran yang sangat minim.	Kerugian keuangan dapat menyebabkan kesulitan bagi perangkat daerah dalam mengelola keuangan	PPP Asemdayong, Masyarakat
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	Risiko Operasional	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kondisi aset yang mengalami kerusakan, keterbatasan dan ketidakseimbangan kompetensi SDM, serta belum maksimalnya penerapan standar pelayanan.	Menurunnya kualitas dan kecepatan pelayanan kepelabuhanan, terganggunya aktivitas operasional nelayan dan pengguna jasa, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelabuhan.	PPP Wonokerto dan penerima layanan kepelabuhanan di PPP Wonokerto.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, belum efektifnya pemanfaatan sistem informasi, serta lemahnya koordinasi dan pengendalian internal.	Keterlambatan layanan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.	PPP Wonokerto dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Manajemen pengelolaan kepelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhan perikanan kurang optimal	Pelayanan kepelabuhan perikanan kurang optimal	Nelayan dan PPP Klidang Lor
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Pegawai tidak berkompeten	Operasional kantor terhambat dan mutu pelayanan turun	Nelayan dan PPP Klidang lor
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Penyesuaian SK Kepala Dinas KP Jateng No 5231.51/1256/VI/2017 tentang SOP Layanan di PPP dan PPI Jawa Tengah	Risiko Strategis	Perubahan Regulasi dan Perkembangan Pelabuhan Perikanan	Pengguna Jasa tidak terlayani dengan tepat dan baik	Masyarakat, PPP Tawang, nelayan, bakul
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Peningkatan kapasitas SDM Internal PPP Tawang	Risiko Operasional	Tidak adanya peta peningkatan kompetensi SDM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Menurun	Pengguna jasa, PPP Tawang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelayanan buruk dan sarpras tidak memadai akibat terendam banjir air ROB	Nelayan tidak dapat melaut dan mendaratkan ikan pelaku usaha perikanan terhambat akibat tempat usaha terendam air ROB	Nelayan, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM (PNS dan PPPK) yang ditugaskan di PPP Morodemak	Pelayanan eksternal (kepada masyarakat) dan pelayanan internal (kepegawaian, keuangan) kurang optimal	Pegawai PPP Morodemak dan Masyarakat Pengguna Jasa
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	Pelaku usaha menambah volume bangunan kios yang disewakan tanpa izin PPP Juwana	Risiko Operasional	Adanya kesempatan pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dari PPP Juwana	Pelayanan sewa lahan terhambat karena perlu merevisi dokumen dan pelaku usaha berpotensi dikenakan sanksi	PPP Juwana dan masyarakat penerima layanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	Kemacetan alur Sungai Silugonggo yang merupakan alur lalu lintas kapal perikanan di PPP Juwana	Risiko Operasional	Penumpukan sampah enceng gondok, penumpukan kapal mangkrak, dan padatnya kedatangan kapal perikanan di hari raya	Pelaku usaha mengeluhkan kualitas pelayanan kepelabuhanan dan kesyahbandaran di PPP Juwana	Pelaku usaha di PPP Juwana, awak kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPP Juwana, PPP Juwana, dan DKP Jateng Prov
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	ASN PPP Juwana belum memenuhi capaian minimal jam pelatihan (JP) dalam kurun waktu satu tahun	Risiko Operasional	Belum adanya pemantauan terhadap capaian jam pelatihan pada masing-masing ASN	ASN PPP Juwana mendapatkan hukuman disiplin dari BKD Provinsi Jawa Tengah	ASN PPP Juwana

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Pemanfaatan lahan kawasan pelabhan tidak sesua Masterplan	Risiko Strategis	Investor menyewa lahan untuk kegiatan pengolahan	Ada fasilitas yang tidak tersedia	Instansi dan Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah berstandar ISO	Risiko Operasional	Penataan SDM yang tepat	PPN Tasikagung menjadi motivator bagi UPT lain untuk meningkatkan layanan	Instansi dan pegawai
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan (pogram)	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal	PPP Karimunjawa dan penerima layanan kepelabuhanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidak cakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Karimunjawa dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	pelayanan kepelabuhan tidak maksimal	Risiko Operasional	Tidak tersedianya sapras dan pelayanan yang kurang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	PPP Lohgending, Masyarakat nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Pelayanan dan kinerja terhambat	Risiko Operasional	komponen peralatan dan perlengkapan kantor tidak terpenuhi	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan msyarakat menurun	PPP Lohgending
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Tidak tertanganinya kasus hama penyakit dengan wabah tertentu yang belum bisa diujikan di lab pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Risiko Operasional	Kompetensi, ruang lingkup dan fasilitas pengujian belum tersedia	Sebaran hama penyakit ikan semakin meluas dan produksi ikan budiaya menurun	pembudidaya ikan, pelanggan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	Risiko Strategis	Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau pelaku usaha hasil perikanan belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dan belum mampu menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang berkualitas sesuai standar	Menurunnya daya saing produk hasil perikanan Provinsi Jawa Tengah serta belum dapat memenuhi tuntutan pasar akan produk hasil perikanan yang berkualitas	Pelaku usaha perikanan, UPI, masyarakat umum
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Menurunnya prosentase pelayanan pelanggan	Risiko Operasional	Fasilitas pelayanan di BKIKHP belum memadai	Turunnya tingkat kepuasan masyarakat serta kinerja organisasi tidak optimal	Pengguna Layanan BKIKHP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi Loka PBI Karimunjawa	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Keterbatasan Saran dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	terdapat kebutuhan pegawai dan fasilitas yang kurang memenuhi standar untuk menunjang urusan pemerintahaan	kegiatan operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja	pemerintahan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	PPP Larangan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Terlambatnya penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Larangan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyelesaian urusan tata usaha di PPP Larangan	Terlambatnya realisasi program dan kegiatan yang ada di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Tingkat pelanggaran tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami peraturan perundang - undangan	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha dan pemerintah
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	Rendahnya kualitas dan kuantitas garam	Risiko Operasional	Aktivitas produksi garam masih bersifat konvensional	Kebutuhan garam tidak terpenuhi dan daya jual produk garam rendah	Petambak garam
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	Pelaku usaha tidak mendapatkan ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan	Risiko Operasional	Pemanfaatan ruang yang diajukan pelaku usaha tidak sesuai dengan Perda Nomor 08 Tahun 2024 tentang RTRWP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan berusaha	Pemerintah daerah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan kelautan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Terjadinya serangan hama penyakit ikan	Risiko Operasional	Pembudidaya ikan belum bisa melakukan pengendalian terhadap cuaca buruk	Produksi perikanan budidaya dan pendapatan pembudidaya menurun	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Perikanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	Risiko Operasional	Edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan tidak menyeluruh	Gizi Masyarakat yang bersumber dari protein ikan tidak terpenuhi	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Lokasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir rawan terjadinya pelanggaran dan berpotensi terdampak akibat adanya bencana alam seperti abrasi, gelombang tinggi dan perubahan iklim	Risiko Operasional	Kurangnya pengetahuan, informasi, pengawasan dan upaya mitigasi yang tepat, cepat dan akurat dalam mengidentifikasi karakteristik spesifik dari lokasi kegiatan rehabilitasi	Luasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Masih terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap perizinan berusaha kelautan perikanan	Risiko Kepatuhan	Kurang optimalnya frekuensi pengawasan kepatuhan pelaku usaha	Penurunan Tingkat kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan di Jawa Tengah	OPD dan Masyarakat
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Masih terdapat IUU Fishing dan Pengelolaan SDKP yang tidak ramah lingkungan	Risiko Kepatuhan	Kurang optimalnya frekuensi Patroli Pengawasan di Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Kerusakan dan Penurunan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah	Masyarakat
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Pelayanan tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat kurang maksimal karena anggaran yang tersedia berkurang karena efisiensi	Risiko Operasional	Jumlah anggaran masih kurang dari pemenuhan kebutuhan operasional dan pentingnya peningkatan kompetensi bagi ASN	Terhambatnya pencapaian target maksimal pada realisasi fisik dan anggaran pada program pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pegawai CDK Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	Risiko Operasional	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Penurunan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan administratif dan kesesuaian teknis	Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dokumen periznan yang dipersyaratkan	Masyarakat
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Tidak terawasinya WPPNRI dari IUU Fishing	Risiko Operasional	Intensitas patroli pengawasan yang rendah	Terjadinya peningkatan IUU Fishing	Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Ketergantungan Nakhoda dan ABK dari instansi lain	Risiko Operasional	Tidak ada tenaga nakhoda dan ABK Kapal Pengawasan CDK Wilayah Selatan	Kegiatan Pengawasan terhambat	Tim Pengawasan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	Risiko Operasional	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir, Pemerintah Daerah, Lingkungan fisik yang ada di lokasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang rendah	Kasus IUU meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase fasilitasi tata kelola pembangunan daerah	Risiko Strategis	Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan secara umum	Pelayanan administrasi umum belum optimal	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Risiko Operasional	Tidak tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Pelaksanaan program tidak terencana dan tidak dievaluasi	OPD
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	Risiko Fraud	Pegawai Tidak menyampaikan pembaharuan data terkait kepegawaian	Pegawai menerima Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Dinas
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	Risiko Operasional	Lamanya administrasi pengajuan klaim	Terlambatnya pencairan klaim	OPD
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurangnya pemahaman regulasi kepegawaian	Risiko Operasional	Penyampaian informasi yang tidak merata	Keterlambatan penyampaian informasi kepegawaian yang terbaru	OPD
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	Risiko Operasional	Kesadaran ASN yang kurang dalam memenuhi dokumen kepegawaian	Keterlambatan pelayanan kepegawaian	OPD
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	Risiko Strategis	Tidak semua merk luar ber TKDN	Sedikit pilihan dalam menentukan pengadaan BMD	OPD
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Risiko Strategis	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Tidak semua Barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	Risiko Operasional	Pagu anggaran tidak mencukupi dengan BMD yang ada	Tidak semua BMD dapat dipelihara dengan maksimal	OPD
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Nelayan calon penerima tidak memenuhi syarat	Risiko Operasional	Tidak terdaftar dalam DT Jateng	Nelayan tidak mendapat perlindungan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan	Nelayan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Nelayan atau awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	Risiko Operasional	Nelayan atau awak kapal perikanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur kerja di atas kapal	1. Resiko kecelakaan pada kapal perikanan; 2.Nelayan tidak bisa mendapatkan sertifikat keterampilan dan kompetensi	Pemerintah dan Pelaku Usaha perikanan tangkap/ Nelayan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Pendaratan ikan hasil tangkapan diluar kawasan pelabuhan	Risiko Operasional	Pembongkaran ikan di dermaga labuh penuh dan antri	Jumlah ikan yang didaratkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya.	Risiko Fraud	Keterbatasan kemampuan SDM nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	1. Denda Administrasi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku; 2. Nelayan tidak bisa berangkat melaut	Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Ijin reklamasi lahan di pelabuhan perikanan belum terbit	Risiko Strategis	Belum adanya payung hukum penerbitan ijin reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah	Sertifikat tanah tidak bisa diterbitkan	Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Pelayanan tambat labuh kapal perikanan di Kawasan PPN Tegalsari	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan untuk membayar retribusi tambat labuh	Penerimaan retribusi tambat labuh di PPN Tegalsari tidak optimal	DKP Prov. Jateng dan PPN Tegalsari
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Pelayanan bongkar muat Ikan di Kawasan PPN Tegalsari (Fungsi Pengusahaan berdasarkan PP 27 Tahun 2021)	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi tentang prosedur bongkar muat ikan yang baik	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga	Masyarakat/konsumen
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPN Tegalsari, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, pengaturan keberangkatan, kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan (STBLKK) di Kawasan PPN Tegalsari (Fungsi Pemerintahan berdasarkan PP 27 Tahun 2021)	Risiko Kepatuhan	Masih banyaknya kapal perikanan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) tidak ramah lingkungan	Tidak terbitnya STBL Kedatangan Kapal dan PB	Nelayan, PPN Tegalsari

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kualitas Pelayanan administrasi umum daerah yang kurang / belum sesuai standar	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah pegawai yang memadai untuk menangani layanan administrasi umum	Kepuasan Masyarakat	PPN Tegalsari, dan Masyarakat pengguna jasa
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	Kantor PPN Tegalsari
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	Risiko Operasional	anggaran untuk pemeliharaan asset milik daerah terbatas	Pelayanan terganggu ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas	PPN Tegalsari dan stakeholder
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong seperti fasilitas untuk Tambat dan labuh Kapal Nelayan	Risiko Operasional	Sedimentasi di kawasan dermaga pelabuhan dan muara Sungai	Kapal-kapal tidak dapat merapat ke dermaga dan kapasitas dermaga kurang maksimal untuk menampung jumlah kapal yang tambat di pelabuhan	Pemilik kapal & ABK

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong, seperti Drainase yang rusak parah dan kebersihan kawasan PPP Asemdayong masih banyak yang kumuh	Risiko Operasional	Kerusakan parah drainase di kawasan pelabuhan, dan Sampah yang menumpuk di kawasan Pelabuhan	Saluran pembuangan air tidak lancar, dan Lingkungan menjadi kotor dan berbau,	Pelaku Usaha, Masyarakat PPP Asemdayong
3	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Tidak ada nya petugas syahbandar yang menetap di Kantor PPP Asemdayong atau berdinan pada Dinas lain	Risiko Operasional	Syahbandar yang bertugas berasal dari luar PPP Asemdayong	Masih banyak nelayan dan pemilik kapal di PPP Asemdayong yang belum / tidak memiliki kesadaran penuh terhadap pengurusan dokumen kapal,	Pemilik kapal dan Nelayan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kualitas pelayanan yang kurang	Risiko Operasional	> Keterbatasan jumlah pegawai yang memadai untuk menangani layanan administrasi umum. > Keterbatasan Anggaran	Kepuasan Masyarakat	PPP Asemdayong, Masyarakat
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kesalahan Data / Data yang belum atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, sehingga menjadi Keterlambatan Penyusunan Laporan	Risiko Operasional	Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pegawai dan Kurangnya Evaluasi	Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam menyusun laporan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas laporan.	Kantor PPP Asemdayong

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan Barang Inventaris yang semakin berat	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran setiap tahunnya	Risiko kerusakan barang milik daerah yang tidak dilakukan pemeliharaan dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan daerah.	Kantor PPP Asemdayong
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan Pemeliharaan BMD	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah anggaran pemeliharaan yang terbilang sangat minim	keterlambatan pemeliharaan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas barang milik daerah.	PPP Asemdayong, Masyarakat, Pelaku Usaha
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko kawasan PPP Wonokerto yang kotor dan kumuh dapat menurunkan kualitas lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar pelabuhan.	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan; rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto	Risiko kesehatan masyarakat, timbul penyakit menular	PPP Wonokerto, masyarakat kawasan PPP Wonokerto
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko kendala dalam penginputan data operasional pelabuhan melalui aplikasi PIPP yang menyebabkan data menjadi tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga menghambat proses pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen.	Risiko Operasional	Aplikasi PIPP mobile sering mengalami gangguan	Kualitas data menjadi tidak akurat atau tidak lengkap	PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko hasil tangkapan yang tidak berkualitas menyebabkan pendapatan nelayan stagnan atau menurun, serta berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan PPP Wonokerto.	Risiko Operasional	SDM nelayan rendah dan kurangnya sosialisasi kepada nelayan untuk meningkatkan produk hasil perikanan	Pendapatan nelayan stagnan atau menurun	Nelayan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi tentang prosedur bongkar muat ikan yang baik	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga	Masyarakat/konsumen
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko rendahnya kualitas dan higienitas pengolahan hasil perikanan di PPP Wonokerto menyebabkan produk tidak memenuhi standar kesehatan dan berpotensi membahayakan konsumen serta menurunkan kepercayaan pasar.	Risiko Operasional	Masih banyak pengolah hasil perikanan melakukan aktivitas penjemuran di jalan	Produk tidak memenuhi standar kesehatan jika dikonsumsi	Masyarakat/konsumen

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	Risiko Operasional	-Kurangnya kesadaran dari pengelola TPI Wonokerto dan pelaku usaha perikanan untuk menjaga kebersihan TPI Wonokerto; -kurangnya sarpras kebersihan di TPI Wonokerto	mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis	Masyarakat/konsumen, PPP Wonokerto
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko perubahan kondisi kawasan pelabuhan yang tidak diikuti dengan pembaruan data dan informasi menyebabkan pengambilan kebijakan serta pelaporan tidak sesuai dengan kondisi faktual, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dan menjadikan pengembangan kawasan PPP Wonokerto tidak optimal.	Risiko Operasional	kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan PPP Wonokerto tidak optimal	PPP Wonokerto, masyarakat kawasan PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kawasan PPP Wonokerto, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman nelayan/pemilik kapal mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan kapal	kerugian ekonomi, kecelakaan kerja yang fatal, peningkatan biaya operasional, penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan citra buruk pelabuhan	PPP Wonokerto, Nelayan, masyarakat di kawasan PPP Wonokerto
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko tidak terbitnya dokumen kapal perikanan berupa STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Berlayar (PB) yang dapat menghambat operasional kapal dan menurunkan kepatuhan administrasi pelabuhan.	Risiko Kepatuhan	Masih banyaknya kapal perikanan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) tidak ramah lingkungan	Tidak terbitnya STBL Kedatangan Kapal dan PB	Nelayan, PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaa API ramah lingkungan	Jika ada patroli pengawasan maka akan tertangkap	Nelayan
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko rendahnya kepatuhan nelayan dalam membayar retribusi tambat labuh yang menyebabkan penerimaan pelabuhan tidak optimal	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan untuk membayar retribusi tambat labuh	Penerimaan retribusi tambat labuh di PPP Wonokerto tidak optimal	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko adanya nelayan yang melakukan lelang di luar TPI Wonokerto sehingga menurunkan volume transaksi dan penerimaan retribusi pelabuhan.	Risiko Operasional	Tidak semua hasil tangkapan nelayan masuk ke TPI Wonokerto	Target data tangkapan perikanan di PPP Wonokerto tidak optimal	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko jumlah CCTV yang masih kurang di kawasan PPP Wonokerto menyebabkan kegiatan pelabuhan tidak terpantau secara menyeluruh, sehingga meningkatkan potensi pencurian, kehilangan aset	Risiko Fraud	Jumlah CCTV di kawasan PPP Wonokerto masih kurang	-Meningkatnya potensi pencurian dan kehilangan aset -Sulitnya mengidentifikasi pelanggaran atau kejadian	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	Risiko Operasional	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas kepelabuhanan tidak dapat dimanfaatkan	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko adanya hubungan kedekatan atau persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Fraud	Adanya hubungan kedekatan; terjadi persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa	Penurunan kualitas hasil pekerjaan dan memburuknya citra/image DKP Provinsi Jawa Tengah	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng, masyarakat kawasan PPP Wonokerto
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Anggaran pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Risiko Strategis	Alokasi anggaran kurang untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Fasilitas kepelabuhan belum memadai	Nelayan dan PPP Klidang Lor
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah dokumen kesyahbandaran yang diterbitkan tidak mencapai target	Risiko Kepatuhan	Jumlah kapal aktif menurun	Volume pelayanan kesyahbandaran menurun	Nelayan dan PPP Klidang Lor
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan	Risiko Reputasi	Penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan	Tingkat kepuasan pengguna jasa menurun	PPP Klidang Lor

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Ketepatan laporan adminitrasi	Risiko Operasional	Data belum lengkap dan belum ada jadwal pelaporan	Penilaian kinerja kurang	PPP Klidang Lor
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah anggaran pemeliharaan aset	Risiko Operasional	Banyak aset dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Aset tidak berfungsi optimal	PPP Klidang Lor dan nelayan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Lengkap tidaknya Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Strategis	Terdapat dokumen pelabuhan perikanan dengan biaya sangat besar	Fasilitas plabuhan perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	pengguna jasa, PPP Tawang
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Banyaknya dokumen perijinan	Risiko Strategis	Pemenuhan dokumen kesyahbandaran diserahkan ke pihak lain buka oleh pemilik kapal	Banyak nelayan tertangkap	Nelayan, PPP Tawang
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Standarisasi Layanan administrasi umum perangkat daerah	Risiko Strategis	Belum adanya SOP layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan administrasi yang tidak terukur dan tidak tepat	Pengguna jasa, PPP Tawang
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Ketepatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Risiko Operasional	tidak adanya identifikasi kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tata kelola pengarsipan tidak terorganisir	PPP Tawang
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Ketepatan identifikasi BMD	Risiko Operasional	Anggaran pemeliharaan barang milik daerah terbatas	Barang milik daerah mengalami kerusakan yang parah	PPP Tawang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	Risiko Fraud	Penerapan kebijakan prioritas	Pelayanan kepelabuhanan terganggu dan kurang optimal	Nelayan dan pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelayanan buruk dan sarpras tidak memadai	Nelayan tidak dapat melaut dan mendaratkan ikan	Nelayan, Masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP yang sudah ditetapkan	Waktu pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih lama (tidak sesuai standar layanan)	Masyarakat dan pelaku usaha perikanan Pengguna Jasa
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	Risiko Operasional	Data dukung tidak lengkap	Penyediaan Jasa Penunjang tidak optimal	PPP Morodemak
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	Risiko Operasional	Rendahnya integritas pegawai	Operasional kegiatan kantor tidak berjalan lancar	PPP Morodemak, Masyarakat Pengguna Jasa
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Penolakan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan oleh masyarakat dan pelaku usaha	Risiko Operasional	Mengganggu kegiatan berusaha	Kegiatan pembangunan terhambat	PPP Juwana dan DKP Prov Jateng
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Alat keselamatan berlayar pada kapal perikanan yang akan berangkat belum lengkap	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah staf untuk mengawasi setiap kapal perikanan yang akan diberangkatkan	Kebakaran kapal perikanan dan kecelakaan kerja awak kapal perikanan	PPP Bajomulyo

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelaku usaha menolak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan	Risiko Kepatuhan	Sikap egois	Ketidakteraturan, meningkatnya durasi pelayanan, dan maladministrasi	Pegawai PPP Juwana dan Kepala PPP Juwana
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jaminan sosial pegawai outsourcing tidak dibayarkan oleh perusahaan penyedia	Risiko Kepatuhan	Kelalaian perusahaan penyedia	Pegawai outsourcing tidak mendapatkan hak dari layanan jaminan sosial	Pegawai outsourcing PPP Juwana dan Kepala PPP Juwana
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kapal operasional Pelabuhan Perikanan rusak	Risiko Operasional	Kondisi alam dan frekuensi penggunaan	Kapal operasional Pelabuhan Perikanan tidak dapat digunakan saat dibutuhkan	Kepala PPP Juwana
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Pengajuan WKOPP ditolak	Risiko Operasional	Sertipikat lahan tidak sesuai dengan luasan yang ada	Nilai evaluasi kinerja pelabuhan perikanan turun	Instansi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/St udi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Pemanfaatan lahan di kawasan pelabuhan tidak tercatat	Risiko Fraud	Petugas lapangan menerima gratifikasi dari pelaku usaha	PAD tidak tercapai	Instansi
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/St udi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Pelaku usaha memperluas lahan yang disewa tanpa ijin Kepala Pelabuhan	Risiko Operasional	Kurangnya pengawasan di lapangan	Kehilangan potensi PAD	Instansi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Terjadi ilegal fishing	Risiko Operasional	Pelayanan lama, sehingga nelayan melaut tanpa ijin	PAD dan PNBP tidak terserap, Pelaku Usaha terkena sanksi	Instansi dan Pelaku Usaha
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Nilai SKP Pegawai rendah	Risiko Operasional	Kompetensi SDM kurang memadai	Karir pegawai terancam	Pegawai
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Listrik di kawasan pelabuhan padam	Risiko Operasional	Tidak tersedianya biaya perawatan	Kegiatan di kawasan pelabuhan terhambat	Pelaku usaha
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang milik daerah rusak dan tidak terpelihara	Risiko Operasional	Tidak tersedia anggaran perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah	Operasional kantor terhambat	Instansi
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Operasional	sarana prasarana PPP yang sangat terbatas, keterbatasan SDM pelayanan	Keperluan nelayan dan pelaku usaha tidak terlayani dengan baik	PPP Karimunjawa, Nelayan dan pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan pihak pengguna layanan dengan petugas lapangan	Penurunan kualitas output pekerjaan	PPP Karimunjawa dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Penumpukan piutang oleh penyewa lahan	Risiko Kemitraan	Pengguna layanan atau mitra melanggar perjanjian yang telah disepakati	Target PAD Pelabuhan yang tidak terpebuhi	PPP Karimunjawa dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	Risiko Operasional	Dokumen pendukung pelabuhan tidak lengkap	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	Risiko Operasional	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Fraud	rekanan / penyedia barang kurang kompeten	kualitas barang/ fasilitas rendah	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan kriteria	Risiko Operasional	Pihak rekanan kurang profesional	Pelayanan terganggu karena perangkat yang di gunakan berkualitas rendah	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan paket mengalami keterlabatan / mundur	Risiko Operasional	Pihak rekanan kurang profesional	Pelayanan terganggu dan tidak terselenggara dengan optimal	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Karimunjawa dan pengguna kawasan (pengguna aset)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan wilayah kerja operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	Risiko Operasional	kurangnya sapras (fasilitas pokok, penunjang, fungsional) yang memadai dalam pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan dan kejelasan batas wilayah kerja operasional pelabuhan, adanya bangunan liar di kawasan pelabuhan	Pengawasan operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	PPP Lohgending dan Masyarakat nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Kapal nelayan yang beroperasi tidak memiliki dokumen yang lengkap	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya kelengkapan dokumen yang dimiliki	Nelayan tidak terlindungi secara hukum dan asuransi, nelayan terhambat dalam mengakses bantuan dari pemerintah	PPP Lohgending dan Masyarakat Nelayan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan optimal	Risiko Operasional	Terbatasnya perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan administrasi kantor dan kurang optimalnya SDM yang dimiliki	Kegiatan operasional kantor dan Pelayanan tidak optimal	PPP Lohgending
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	Risiko Operasional	Adanya kenaikan tarif biaya langganan listrik/air/telepon/internet di tahun berjalan yang tidak dapat di prediksi	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi biaya tagihan langganan sehingga tagihan langganan di akhir tahun tidak dapat dibayar	PPP Lohgending
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	PPP Lohgending
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	Menurunnya jumlah sampel yang diujikan di BKIKHP	Risiko Operasional	Media/Reagen, peralatan di laboratorium tidak tercukupi dan parameter ruang lingkup belum terakreditasi	kredibilitas laboratorium BKIKHP menurun	Pelanggan/Pelaku usaha budidaya, BKIKHP, DKP Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	adanya unit pembudidaya yang tidak tertangani terkait kesehatan hama Penyakit Ikan	Risiko Operasional	Monitoring dan pengendalian Hama Penyakit Ikan tidak dilakukan diseluruh unit pembudidaya di Jawa Tengah	Hama dan pnyakit ikan tidak tertangani dan Produksi ikan budidaya menurun	Pelaku usaha pembudidaya
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Target penerbitan Certifikat Analysis Test tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan parameter pengujian yang semakin meningkat sesuai tuntutan pasar global	Target penerimaan PAD tidak tercapai	Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha perikanan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	peralatan pengujian tidak bisa beropoerasi dengan laik	Risiko Operasional	peralatan pengujian sudah berumur diatas 10 tahun dan keterbatasan anggaran pemiliharaan peralatan	durasi pengujian menjadi lebih lama, bahkan ada parameter pengujian yang terhenti	masyarakat, pelaku usaha perikanan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan pengujian	Risiko Operasional	peraturan pemerintah mewajibkan TKDN sedangkan produk media dan reagen lokal (non impor) masih terbatas	Kegiatan pengujian terhambat	Pelanggan, Pelaku Usaha perikanan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai standar	Risiko Operasional	Sarana dan prasarana layanan administrasi umum tidak memadai	Menurunnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat	Pengguna Layanan BKIKHP
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi di Loka PBI Karimunjawa	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya Produksi Benih Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	Risiko Operasional	Turunnya Produktifitas Induk Ikan Endemik di Loka PBI Ngrajek	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Sarana dan Prasarana Revitalisasi Tambak Dinas DKP Prov. Jateng di Kab Jepara dalam rangka Modelling Pembenihan Ikan Nila Salin	Risiko Operasional	Sarana dan Prasarana kurang memenuhi standar untuk memproduksi benih ikan Nila Salin	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ambarawa	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Randudongkal	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Singasari	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Tambaksogra	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Janti	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Muntilan	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Maribaya	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Sluke	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan udang	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ngrajek	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Potensi penurunan kualitas pelayanan adminstrasi umum daerah	Risiko Operasional	SDM kurang terpenuhi, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan disampaikan	Pemerintahan dan Masyarakat Pengguna layanan
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Potensi laporan penyediaan jasa dan kegiatan yang kurang rapi	Risiko Operasional	SDM kurang memadai, anggaran terbatas	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	pemerintahan
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemanfaatan BMD kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran serta kesulitan dalam pengusulan dan penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal	pemerintahan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Nelayan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	Risiko Operasional	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran	Kegiatan administrasi perkantoran di PPP Larangan yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Biaya pengeluaran yang tidak terduga dari belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Risiko Operasional	Adanya belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang berlebihan	Realisasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disusun	PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Aset barang milik daerah yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang milik daerah	Aset barang milik daerah yang tidak bisa digunakan lagi	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Tingkat pelanggaran sektor pemanfaatan sumberdaya perikanan masih cukup tinggi	Risiko Kepatuhan	masih banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha dan pemerintah
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha pengaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha tidak Mengetahui Peraturan perundang-undangan	Risiko Kepatuhan	Pelaku usaha melanggar peraturan perundang - undangan	masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha	Nelayan, Masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	Pelaku usaha tidak mengetahui undang-undang	Risiko Kepatuhan	Masih banyaknya Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Nelayan, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Masih banyaknya masyarakat atau pelaku usaha belum mengetahui peraturan perundang undangan	Risiko Kepatuhan	Karena Pelaku Usaha banyak yang tidak mengetahui peraturan perundang undangan	Pemerintah rugi	Nelayan dan Pelaku usaha
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir	Risiko Operasional	Kategori kawasan konservasi yang diusulkan tidak sesuai dengan Permen KP No 31 Tahun 2020	Hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Pengelolaan ruang laut menjadi tidak optimal	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan terkait pemanfaatan ruang laut	Terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut dan kerusakan lingkungan	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Petambak garam menghasilkan garam tidak sesuai standar	Risiko Operasional	Rendahnya motivasi petambak garam dikarenakan tingkat harga dan kondisi cuaca (kemarau basah)	Pemenuhan kebutuhan garam industri tidak tercapai	Petambak garam
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Masyarakat pesisir tidak terampil dalam pengelolaan keuangan baik kelompok maupun perorangan	Risiko Operasional	Masyarakat pesisir belum bisa menentukan skala prioritas finansial	Kesejahteraan masyarakat pesisir tidak meningkat	Perempuan/taruna pesisir

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kelompok Usaha yang meningkat teknologinya	Adanya praktek suap dan pengaturan penyedia	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	Risiko Fraud	Menginginkan agar penerima bantuan dapat diberikan bantuan kembali sesering mungkin	Profesionalisitas pemilik pekerjaan berkurang	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Pembudidaya ikan belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar	Risiko Operasional	Pembudidaya Ikan belum memahami pentingnya budidaya ikan sesuai standar	Produk Perikanan Budidaya Tidak Laku di Pasaran	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	Risiko Operasional	Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan	Bantuan yang diberikan tidak digunakan (mangkrak)	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Pembudidaya masih menerapkan sistem budidaya tradisional (sederhana)	Risiko Operasional	Pembudidaya ikan tidak mampu menyediakan alat penunjang teknologi	Produksi budidaya ikan rendah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Ikan	Data Produksi Olahan Hasil Perikanan tidak akurat	Risiko Operasional	Tidak ada keterbukaan informasi dari Pelaku Usaha	Kebijakan pengembangan hilirisasi perikanan tidak tepat sasaran	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	Risiko Operasional	Keterbatasan akses informasi, teknologi, dan jejaring usaha	Produk perikanan tidak mampu berdaya saing	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku bagi industri pengolahan ikan tidak optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan sistem informasi pasokan bahan baku dan distribusi	Kontinuitas produksi perikanan terhambat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	Risiko Operasional	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	Masyarakat Pesisir
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi kegiatan penanaman mangrove belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	Risiko Operasional	Kurangnya informasi lahan untuk penanaman mangrove yang sesuai dengan pembagian lokasi dari Bappeda Jateng	Luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir, Instansi Pemerintah
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pemahaman masyarakat/nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan ekosistem terumbu karang, Menurunnya hasil tangkapan nelayan	Masyarakat pesisir, Nelayan dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	Risiko Operasional	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja/Kematian	Petugas, Instansi Pemerintah
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Risiko Kepatuhan	Belum optimalnya tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera	Tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar jika sanksi penanganan tindak lanjut belum optimal	OPD dan Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Belum optimalnya penerapan sanksi administrasi terutama denda administrasi sebagai efek jera terhadap tindak lanjut pelanggaran	Risiko Kepatuhan	Masih belum adanya turunan peraturan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewenangan provinsi sebagai pemasukan PAD	Kurangnya efek jera terhadap pelaku usaha	OPD, Masyarakat
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Belum optimalnya frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang diawasi	Risiko Operasional	Biaya operasional operasi yang tinggi dan Kesiapan sarana prasarana operasi yang belum maksimal	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang diawasi	OPD dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Rendahnya tingkat penerbitan HPK dan SLO Kapal perikanan Kewenangan Provinsi	Risiko Kepatuhan	Masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran terkait kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan kewenangan provinsi tidak terlapor dan terawasi	OPD, Masyarakat dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kurang terpenuhinya sarana Peralatan dan perlengkapan kantor	Risiko Operasional	Jumlah anggaran pemenuhan Peralatan Kantor yang sangat terbatas	kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat tidak memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang maksimal menunjang kinerja.	Karyawan cabang dinas kelautan wilayah barat
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dan internet dalam 1 tahun	Risiko Operasional	Peningkatan penggunaan dan kenaikan tarif sumberdaya listrik dan internet	Jumlah anggaran tidak memenuhi tagihan sehingga menimbulkan silpa dan tagihan dibayar DKP	Pegawai CDK Wilayah Barat
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Adanya kenaikan tarif pajak kendaraan dan Terlambatnya proses pemeliharaan yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kegiatan	Risiko Operasional	Adanya kebijakan kenaikan tarif pajak kendaraan oleh pemerintah, Usia sarana dan prasarana yg sudah waktunya diganti serta Keterbatasan anggaran pemeliharaan barang yang ada.	Kurangnya anggaran pemeliharaan, Kerusakan barang akibat keterlambatan pemeliharaan sehingga dapat mengganggu operasional program kegiatan, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan.	Pegawai CDK Wilayah Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca Ekstrem	Risiko Operasional	1. Genteng dan plafon mulai bocor 2. Tembok bangunan mulai retak 3. pagar dan komponen kusen material besi dan baja keropos	1. Dampaknya kinerja karyawan terhambat 2. keselamatan jiwa karyawan bisa terancam	karyawan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Mangrove yang ditanam mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	Risiko Operasional	Kondisi oseanografi pesisir selatan Jawa Tengah yang ekstrem	Hasil penanaman mangrove hingga masa pemeliharaan selesai menjadi kurang baik	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	Tindak lanjut pelanggaran pelaku usaha tidak terselesaikan	Risiko Operasional	Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas yang kurang memadai	Target kinerja tidak tercapai	OPD
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Menurunnya intensitas operasi pengawasan SDKP dengan speedboat	Risiko Operasional	Intensitas operasi pengawasan SDKP dengan speedboat yang rendah	Pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak diperiksa	Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Jumlah HPK dan SLO yang diterbitkan tidak mencapai target	Risiko Operasional	Kurangnya SDM Pengawas Perikanan yang dimiliki	Penerbitan HPK dan SLO yang tidak optimal	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan yang menggunakan kapal diatas 5 GT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	Risiko Operasional	tidak dapat transaksi pembelian barang lewat GO	Kegiatan layanan administrasi terhambat	Seluruh Pegawai CDK Wilayah Selatan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Seluruh Pegawai CDK Wilayah Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan pelayanan terhambat	Seluruh Pegawai CDK Wilayah Selatan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Petugas pengawasan tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	1. Peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang selalu diperbaharui 2. Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur sanksi sektor kelautan dan perikanan	1. Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pelaku Usaha (kewenangan provinsi) yang melanggar tidak memiliki efek jera	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang terbatas	Kasus IUU Fishing meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Stakeholder dan Lingkungan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Keterbatasan SDM Pengawas Perikanan	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah petugas penerbit HPK dan SLO kapal perikanan	HPK dan SLO tidak terbit	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Strategis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum rendah	Risiko Strategis	Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan secara umum	Pelayanan administrasi umum belum optimal	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
8	Sasaran Strategis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Tidak terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara rutin	Operasional kantor tidak berjalan dengan baik	Pemakai kendaraan dinas operasional

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SASARAN									
Kematian ikan	3	4	12	Ada	Monitoring hama dan penyakit ikan	Memadai	2	2	4
Benih ikan tidak tumbuh berkembang	3	4	12	Ada	Sertifikasi dan pembinaan perbenihan ikan	Memadai	2	2	4
Nelayan tidak melaut	3	4	12	Ada	Hibah/bantuan kepada nelayan	Memadai	2	3	6
Nelayan melaut semakin jauh	3	4	12	Ada	Pembuatan Terumbu Karang Buatan dan pengawasan penggunaan alat tangkap	Memadai	3	2	6
Petambak garam tidak dapat berproduksi	4	4	16	Ada	Penggunaan teknologi geo membran dan tunnel dalam produksi garam	Belum Memadai	3	3	9
Petambak garam tidak dapat berproduksi	4	4	16	Ada	Bantuan/hibah peralatan produksi garam kepada petambak garam	Memadai	2	3	6
Pelayanan lambat	3	3	9	Ada	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan	Memadai	0	0	0
Pelayanan lambat	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan kanal aduan	Memadai	0	0	0
Kurang pemahaman identifikasi risiko	3	3	9	Ada	Pertemuan dan pembinaan SPIP setiap tahun, penilaian maturitas SPIP	Memadai	0	0	0
Matinya bibit mangrove yang ditanam	3	4	12	Ada	Jenis mangrove sesuai dengan jenis tanah	Memadai	0	0	0
Matinya bibit mangrove yang ditanam	3	4	12	Ada	Dilindungi dari gangguan/papan peringatan	Memadai	0	0	0
PROGRAM									
Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	3	4	12	Ada	Rapat koordinasi pengendalian operasional program/kegiatan secara rutin tiap bulan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capaian Kinerja Rendah	2	2	4	Ada	Peningkatan Kapasitas SDM Yang Memadai	Memadai	1	1	1
Populasi sumber daya ikan menurun	4	2	8	Ada	Penenggelaman rumah ikan	Belum Memadai	3	2	6
Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	3	4	12	Ada	Meningkatkan sarana prasarana pelabuhan di PPN Tegalsari	Memadai	3	3	9
Target dan realisasi program kegiatan tercapai	3	4	12	Ada	mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan	Memadai	3	3	9
Keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada nelayan dan pengguna jasa pelabuhan perikanan	3	3	9	Ada	Pelatihan SDM dan pemenuhan sarana prasarana	Memadai	3	3	9
Kurangnya motivasi SDM dapat menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas.	3	3	9	Ada	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dikelola dengan baik.	Memadai	3	2	6
Keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyebabkan penurunan kepuasan dan kepercayaan.	4	3	12	Ada	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan.	Memadai	3	3	9
Kurangnya anggaran yang dapat menyebabkan kesulitan dalam membiayai kegiatan.	4	4	16	Ada	Koordinasi dan kerjasama antara PPP Asemdayong dan DKP Prov Jateng terkait Pengadaan fasilitas dan peralatan yang memadai.	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana kepelabuhanan secara bertahap, penataan dan peningkatan kapasitas SDM, penguatan penerapan standar operasional prosedur pelayanan kepelabuhanan, optimalisasi koordinasi antarunit terkait, serta monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Melalui peningkatan kapasitas dan pemerataan kompetensi SDM, penataan dan penegasan tugas serta fungsi kepegawaian, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pelayanan dan keuangan, penyusunan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten, serta penguatan koordinasi dan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi secara berkala	Memadai	1	2	2
Manajemen pengelolaan kepelabuhan perikanan	1	5	5	Ada	Manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan melalui perencanaan, pengendalaian, koordinasi dan evaluasi	Memadai	1	4	4
Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	2	2	4	Ada	Peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan seminar.	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyesuaian SK Kepala Dinas KP Jateng No 5231.51/1256/VI/2017 tentang SOP Layanan di PPP dan PPI Jawa Tengah	3	2	6	Ada	Penerbitan ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu	Memadai	2	1	2
Peningkatan kapasitas SDM Internal PPP Tawang	2	3	6	Ada	Sumber Daya Manusia (SDM) mengikuti pengembangan kompetensi	Memadai	2	2	4
Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	4	3	12	Ada	Pelatihan SDM dan pemenuhan sarpras	Memadai	3	2	6
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	2	2	4	Ada	Mengajukan usulan Analisis Beban Kerja untuk penambahan pegawai	Memadai	2	2	4
Pelaku usaha menambah volume bangunan kios yang disewakan tanpa izin PPP Juwana	3	4	12	Ada	Pengawasan kondisi bangunan kios oleh petugas lapangan	Memadai	1	4	4
Kemacetan alur Sungai Silugonggo yang merupakan alur lalu lintas kapal perikanan di PPP Juwana	3	4	12	Ada	Patroli pengaturan dan pengamanan alur serta bersih kawasan PPP Juwana dan alur Sungai Silugonggo	Memadai	1	4	4
ASN PPP Juwana belum memenuhi capaian minimal jam pelatihan (JP) dalam kurun waktu satu tahun	3	4	12	Ada	Mengidentifikasi ketersediaan kegiatan pelatihan dan melaksanakan pemantauan pemenuhan JP secara periodik (triwulanan)	Memadai	1	4	4
Pemanfaatan lahan kawasan pelabhan tidak sesua Masterplan	3	4	12	Ada	Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan lahan bersama Subbag Umum Kepegawaian dan Bidang Perikanan Tangkap	Memadai	1	3	3
Pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah berstandar ISO	1	1	1	Ada	Melakukan penataan, pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (pogram)	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik, Penunjukan rekanan yang profesional dan kompeten	Memadai	2	2	4
pelayanan kepelabuhanan tidak maksimal	3	4	12	Ada	peningkatan pelayanan serta sarpras penunjang pelayanan, Koordinasi dengan instansi terkait	Belum Memadai	3	4	12
Pelayanan dan kinerja terhambat	4	4	16	Ada	Pemenuhan komponen prasarana kantor serta koordinasi dan konsultasi SKPD	Belum Memadai	3	3	9
Tidak tertanganinya kasus hama penyakit dengan wabah tertentu yang belum bisa diujikan di lab pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	4	4	16	Ada	Menyusun rencana monitoring pengendalian penyakit ikan dan menyusun rencana penambahan ruang lingkup pengujian penyakit ikan berpotensi wabah	Memadai	3	3	9
Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	3	4	12	Ada	Melakukan pembinaan pada UPI dan pelaku usaha perikanan hingga agar mampu memenuhi standar serta memberikan pelayanan dalam pengujian mutu hasil perikanan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk hasil perikanan yang dihasilkan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya prosentase pelayanan pelanggan	3	3	9	Ada	Mengalokasikan fasilitas sarana dan prasarana tersedia secara optimal sesuai dengan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi Loka PBI Karimunjawa	3	5	15	Ada	Perbaiki Sarana dan Prasarana Produksi	Memadai	2	5	10
Keterbatasan Saran dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	3	2	6	Ada	Pengoptimalan kebutuhan pegawai dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan yang memadai	Memadai	2	2	4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak	4	4	16	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan kebutuhan SDM yang kompeten kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	4	4	16	Ada	Melakukan penagihan retribusi secara berkala bagi penyewa lahan yang belum membayar	Belum Memadai	3	4	12
Terlambatnya penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Larangan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran urusan tata usaha di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat pelanggaran tinggi	4	3	12	Ada	memberikan sosialisasi ke pelaku usaha	Memadai	3	2	6
Rendahnya kualitas dan kuantitas garam	3	3	9	Ada	Memberikan bantuan hibah teknologi produksi garam tepat sasaran	Memadai	1	2	2
Pelaku usaha tidak mendapatkan ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan	4	2	8	Ada	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	Memadai	2	1	2
Terjadinya serangan hama penyakit ikan	3	4	12	Ada	Pembinaan Cara Pembudidaya Ikan dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Memadai	3	2	6
Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	4	3	12	Ada	Mengedukasi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Memadai	3	3	9
Lokasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir rawan terjadinya pelanggaran dan berpotensi terdampak akibat adanya bencana alam seperti abrasi, gelombang tinggi dan perubahan iklim	4	4	16	Ada	1. Melakukan dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi, lembaga dan masyarakat, 2. Melakukan pemetaan potensi lahan/area yang akan direhabilitasi, 3. Melakukan kegiatan monitoring secara berkala (rutin), dan 4. Memperkuat kegiatan pengawasan	Memadai	2	3	6
Masih terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap perizinan berusaha kelautan perikanan	4	4	16	Ada	Melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan secara rutin	Belum Memadai	2	2	4
Masih terdapat IUU Fishing dan Pengelolaan SDKP yang tidak ramah lingkungan	5	5	25	Ada	Meningkatkan frekuensi patroli pengawasan di Wilayah Cakupan WPPNRI Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat kurang maksimal karena anggaran yang tersedia berkurang karena efisiensi	2	3	6	Ada	Melakukan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara matang dan berkelanjutan, serta menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.	Memadai	1	3	3
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	5	3	15	Ada	Survei lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok konservasi masyarakat setempat, dan penyuluh kehutanan	Belum Memadai	4	3	12
Penurunan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan	2	3	6	Ada	Penyadartahuan pelaku usaha terkait peraturan yang berlaku	Memadai	1	3	3
Tidak terawasinya WPPNRI dari IUU Fishing	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan	Memadai	2	3	6
Ketergantungan Nakhoda dan ABK dari instansi lain	3	3	9	Ada	Bekerjasama dengan PSDKP untuk dukungan personel Nakhoda dan ABK	Memadai	3	2	6
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	4	4	16	Ada	Melakukan groundcheck	Memadai	4	3	12
Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	3	4	12	Ada	- Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku - Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan Perikanan - Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi administratif dan memfasilitasi/mendorong untuk melengkapi administrasi perijinan berusaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Memadai	3	3	9
Persentase fasilitasi tata kelola pembangunan daerah	2	3	6	Ada	Meningkatkan koordinasi ketersediaan dokumen pendukung dari Perangkat Daerah terkait agar tersusun/ tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan	Memadai	2	3	6
KEGIATAN									
Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan <u>dokumen evaluasi</u>	2	4	8	Ada	Penyusunan RKPD dan Rakor POK	Memadai	1	2	2
Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	2	3	6	Ada	Pengecekan secara berkala antara data kepegawaian dan data gaji	Memadai	1	2	2
Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	2	4	8	Ada	Memilih asuransi yang terpercaya	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurangnya pemahaman regulasi kepegawaian	2	4	8	Ada	Mendatangkan narasumber untuk memberikan pemahaman tentang regulasi kepegawaian	Memadai	1	2	2
Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	2	4	8	Ada	Menyampaikan daftar nominatif ASN yang belum melengkapi dokumen kepegawaian	Memadai	1	2	2
Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	2	4	8	Ada	Menaikkan pagu anggaran dalam pengadaan BMD	Memadai	1	2	2
Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Belum Memadai	1	2	2
Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Memadai	1	2	2
Nelayan calon penerima tidak memenuhi syarat	3	3	9	Ada	Sosialisasi tata cara pendaftaran DT Jateng	Memadai	2	3	6
Nelayan atau awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	2	3	6
Pendaratan ikan hasil tangkapan diluar kawasan pelabuhan	3	4	12	Ada	Pengumpulan data statistik perikanan tangkap melibatkan petugas/operator di masing2 kabupaten/kota dan dilakukan validasi data tiap semester sehingga setiap data produksi dan nilai produksi telah dilakukan filter dan validasi, dimulai dari petugas dilapangan, operator dan petugas Validator di masing-masing kabupaten/kota, kemudian dilakukan validasi pada tingkat provinsi serta rekrutmen enumerator pendataan produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh KKP.	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya.	4	5	20	Ada	Melakukan Sosialisasi dan Gerai Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel.	Memadai	3	3	9
Ijin reklamasi lahan di pelabuhan perikanan belum terbit	2	4	8	Ada	Berkoordinasi dengan DPMPSTP dan Biro Hukum	Memadai	1	4	4
Pelayanan tambat labuh kapal perikanan di Kawasan PPN Tegalsari	3	4	12	Ada	Petugas PPN Tegalsari melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada nelayan terkait pembayaran retribusi tambat labuh	Memadai	3	3	9
Pelayanan bongkar muat Ikan di Kawasan PPN Tegalsari (Fungsi Pengusahaan berdasarkan PP 27 Tahun 2021)	5	5	25	Ada	Diadakan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan ikan yang baik	Memadai	2	4	8
Ketidapatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	4	12	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, pengaturan keberangkatan, kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan (STBLKK) di Kawasan PPN Tegalsari (Fungsi Pemerintahan berdasarkan PP 27 Tahun 2021)	4	3	12	Ada	Dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kapal perikanan	Memadai	3	3	9
Kualitas Pelayanan administrasi umum daerah yang kurang / belum sesuai standar	2	3	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	3	3	9
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3	2	6	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	3	2	6
kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	3	3	9	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal, perawatan kendaraan dinas secara rutin	Memadai	2	3	6
kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong seperti fasilitas untuk Tambat dan labuh Kapal Nelayan	3	4	12	Ada	Mengusulkan Pengerukan di kawasan Dermaga PPP Asemdayong dan Muara Sungai Elon, Monitoring terhadap kegiatan pendaratan ikan	Belum Memadai	3	4	12
kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong, seperti Drainase yang rusak parah dan kebersihan kawasan PPP Asemdayong masih banyak yang kumuh	4	4	16	Belum Ada	Mengusulkan perbaikan saluran drainase yang rusak, dan Mengusulkan petugas kebersihan di kawasan pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak ada nya petugas syahbandar yang menetap di Kantor PPP Asemdayong atau berdinasi pada Dinas lain	3	3	9	Ada	memfasilitasi pelayanan terpadu satu pintu yang rutin diadakan setiap 1 minggu sekali pada hari rabu, dengan melibatkan stakeholder Kantor Kesehatan Pelabuhan, PSDKP, KSOP, dan PPN Pekalongan,	Memadai	2	3	6
Kualitas pelayanan yang kurang	2	2	4	Ada	> Pengembangan Standar Layanan > Pelatihan Pegawai	Memadai	1	1	1
Kesalahan Data / Data yang belum atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, sehingga menjadi Keterlambatan Penyusunan Laporan	2	2	4	Ada	Pelatihan pegawai	Memadai	2	2	4
Kerusakan Barang Inventaris yang semakin berat	3	3	9	Ada	Pembuatan Rencana Pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang ada	Memadai	3	3	9
Keterlambatan Pemeliharaan BMD	3	4	12	Ada	Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan prioritasnya untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan pada waktu yang tepat.	Memadai	3	4	12
Risiko kawasan PPP Wonokerto yang kotor dan kumuh dapat menurunkan kualitas lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar pelabuhan.	2	4	8	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan PP Wonokerto untuk ikut menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan.	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Risiko kendala dalam penginputan data operasional pelabuhan melalui aplikasi PIPP yang menyebabkan data menjadi tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga menghambat proses pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen.	2	2	4	Ada	koordinasi dengan Tim IT PIPP KKP	Memadai	1	1	1
Risiko hasil tangkapan yang tidak berkualitas menyebabkan pendapatan nelayan stagnan atau menurun, serta berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan PPP Wonokerto.	3	3	9	Ada	Diadakan sosialisasi, penyuluhan, serta pengembangan masyarakat nelayan	Memadai	2	2	4
Risiko proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	3	4	12	Ada	Diadakan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan ikan yang baik	Memadai	2	3	6
Risiko rendahnya kualitas dan higienitas pengolahan hasil perikanan di PPP Wonokerto menyebabkan produk tidak memenuhi standar kesehatan dan berpotensi membahayakan konsumen serta menurunkan kepercayaan pasar.	3	4	12	Ada	Dilakukan pengecekan lab lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang optimal	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Risiko kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	3	4	12	Ada	koordinasi dengan pengelola TPI Wonokerto terkait kebersihan lingkungan TPI Wonokerto	Memadai	2	3	6
Risiko perubahan kondisi kawasan pelabuhan yang tidak diikuti dengan pembaruan data dan informasi menyebabkan pengambilan kebijakan serta pelaporan tidak sesuai dengan kondisi faktual, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dan menjadikan pengembangan kawasan PPP Wonokerto tidak optimal.	3	4	12	Ada	Menyusun dokumen pendukung pengembangan PPP Wonokerto	Memadai	2	3	6
Risiko rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	3	5	15	Ada	- Sosialisasi keselamatan pelayaran dan penanganan darurat ; - Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR) di area tertentu	Memadai	3	4	12
Risiko tidak terbitnya dokumen kapal perikanan berupa STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Berlayar (PB) yang dapat menghambat operasional kapal dan menurunkan kepatuhan administrasi pelabuhan.	4	4	16	Ada	Dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kapal perikanan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Risiko kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan pembinaan bagi kapal perikanan yang melanggar aturan	Memadai	3	4	12
Risiko rendahnya kepatuhan nelayan dalam membayar retribusi tambat labuh yang menyebabkan penerimaan pelabuhan tidak optimal	4	4	16	Ada	Petugas PPP Wonokerto melakukan sosialisasi dan pemdampingan kepada nelayan terkait pembayaran retribusi tambat labuh	Memadai	2	3	6
Risiko adanya nelayan yang melakukan lelang di luar TPI Wonokerto sehingga menurunkan volume transaksi dan penerimaan retribusi pelabuhan.	3	3	9	Ada	Dilakukan penertiban kepada nelayan agar semua hasil tangkapan masuk ke TPI Wonokerto	Memadai	2	2	4
Risiko jumlah CCTV yang masih kurang di kawasan PPP Wonokerto menyebabkan kegiatan pelabuhan tidak terpantau secara menyeluruh, sehingga meningkatkan potensi pencurian, kehilangan aset	2	5	10	Ada	Pengadaan CCTV Sesuai Standar dan Prosedur	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Risiko banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	4	4	16	Ada	Penghapusan aset mangkrak, mencari potensi lahan lainnya	Memadai	3	4	12
Risiko adanya hubungan kedekatan atau persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	3	5	15	Ada	- Melakukan Sistem Pengendalian Internal terhadap proses PBJ; - melakukan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dalam PBJ	Memadai	2	2	4
Anggaran pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	2	5	10	Ada	Menyusun rencana anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi berbasis skala prioritas	Memadai	2	4	8
Jumlah dokumen kesyahbandaran yang diterbitkan tidak mencapai target	1	5	5	Ada	Sosialisasi kepada nelayan kecil yang belum memiliki izin	Memadai	1	4	4
Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan	1	3	3	Ada	Internalisasi standar pelayanan publik	Memadai	1	1	1
Ketepatan laporan adminitrasi	3	2	6	Ada	Penetapan jadwal pelaporan dan pelapran admintrasi secara berkala	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah anggaran pemeliharaan aset	1	3	3	Ada	Proritas pemeliharaan aset yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	1	5	5
Lengkap tidaknya Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	4	12	Ada	Review master plan	Memadai	3	3	9
Banyaknya dokumen perijinan	3	4	12	Ada	Fasilitasi Perizinan berupa sosialisasi dan pendampingan nelayan Pemenuhan kebutuhan SDM Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran	Memadai	3	3	9
Standarisasi Layanan administrasi umum perangkat daerah	2	3	6	Ada	Peningkatan kapasitas SDM internal	Memadai	2	2	4
Ketepatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	2	4	Ada	Digitalisasi arsip dengan scanning dokumen dan penyimpanan komputer/gdrive	Memadai	1	2	2
Ketepatan identifikasi BMD	3	3	9	Ada	Pemakaian BMD sesuai kapasitas dan anggaran yang tersedia	Memadai	2	3	6
Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	4	3	12	Ada	Mencari alternatif sumber pembiayaan dari APBN dan / CSR	Memadai	3	2	6
Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	4	3	12	Ada	Pelatihan dan pemenuhan sarpras	Belum Memadai	3	2	6
Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	3	2	6	Ada	Membuat SOP dan Melakukan Pelayanan kepada Pengguna Jasa berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; Pengawsan Berjenjang	Memadai	2	1	2
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	2	1	2	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	2	2	4	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Penolakan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan oleh masyarakat dan pelaku usaha	3	4	12	Ada	Rembug gayeng dan rapat koordinasi selama proses perencanaan pembangunan bersama masyarakat dan pelaku usaha	Memadai	1	4	4
Alat keselamatan berlayar pada kapal perikanan yang akan berangkat belum lengkap	3	4	12	Ada	Patroli Monitoring Kapal Perikanan secara berkala	Memadai	1	4	4
Pelaku usaha menolak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan	3	4	12	Ada	Pembinaan kepada pelaku usaha oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Memadai	1	3	3
Jaminan sosial pegawai outsourcing tidak dibayarkan oleh perusahaan penyedia	3	4	12	Ada	Meminta perusahaan untuk mengirimkan rekap pembayaran jaminan sosial	Memadai	1	4	4
Kapal operasional Pelabuhan Perikanan rusak	4	3	12	Ada	Pemanasan, pengoperasian, dan pemeliharaan kapal operasional yang terjadwal	Memadai	1	3	3
Pengajuan WKOPP ditolak	3	1	3	Ada	Melakukan koordinasi dengan Petugas Aset dan BPKAD terkait sertipikat kepemilikan lahan kawasan pelabuhan	Memadai	2	1	2
Pemanfaatan lahan di kawasan pelabuhan tidak tercatat	3	4	12	Ada	Pembinaan SDM	Memadai	2	3	6
Pelaku usaha memperluas lahan yang disewa tanpa ijin Kepala Pelabuhan	3	4	12	Ada	Melakukan patroli pengawasan kawasan pelabuhan	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terjadi ilegal fishing	1	4	4	Ada	Menempatkan SDM yang kompeten untuk pelayanan penerbitan dokumen kesyahbandaran	Memadai	1	2	2
Nilai SKP Pegawai rendah	2	4	8	Ada	Pembinaan, pendampingan dan peningkatan kopetensi SDM	Memadai	1	2	2
Listrik di kawasan pelabuhan padam	1	4	4	Ada	Mengusulkan biaya perawatan lampu kawasan pelabuhan	Memadai	1	1	1
Barang milik daerah rusak dan tidak terpelihara	2	3	6	Ada	Menghitung kebutuhan biaya perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah dan mengusulkan ke dalam rencana anggaran	Memadai	1	2	2
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	Perbaiki sistem administrasi, pengajuan dokumen pendukung, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	9
Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksana, penegakan disiplin, Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	2	2	4
Penumpukan piutang oleh penyewa lahan	4	3	12	Ada	Penegakan perjanjian sewa, Pembinaan Tenaga pelaksana, monitoring dan pengawasan atasan, pemberian sanksi bagi pelanggar perjanjian	Memadai	3	2	6
Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	4	3	12	Ada	Perbaiki sistem administrasi, pengajuan dokumen pendukung, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	9
fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	4	3	12	Ada	Perbaiki dan pemilharaan, pengajuan anggaran	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perbaikan fasilitas terhambat	2	3	6	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	1	3	3
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	3	4	12	Ada	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	9
Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan kriteria	2	3	6	Ada	Pemilihan rekanan yang kompeten dan profesional, pengawasan dan koordinasi dengan rekanan	Memadai	1	2	2
Laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun dengan baik	2	2	4	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	2	2
Penyediaan paket mengalami keterlabatan / mundur	3	2	6	Ada	Pemilihan rekanan yang kompeten dan profesional, pengawasan dan koordinasi dengan rekanan	Memadai	2	2	4
Laporan Penyediaan Jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	1	2	2	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	3	3	9	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan wilayah kerja operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	4	4	16	Ada	Pembangunan gedung pengawasan SAR, Rehabilitasi tempat istirahat nelayan, Review masterplan Pelabuhan, Ukur ulang batas tanah kawasan pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16
Kapal nelayan yang beroperasi tidak memiliki dokumen yang lengkap	4	4	16	Ada	Sosialisasi serta rembug gayeng stake holder	Belum Memadai	3	4	12
Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan optimal	2	3	6	Ada	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan, pembinaan pegawai	Belum Memadai	2	2	4
Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	3	4	12	Ada	Penambahan anggaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet melalui anggaran perubahan	Memadai	3	3	9
Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	4	4	16	Ada	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Belum Memadai	4	3	12
Menurunnya jumlah sampel yang diujikan di BKIKHP	4	4	16	Ada	Rekapitulasi penggunaan dan pemenuhan kebutuhan media/reagen dan peralatan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
adanya unit pembudidaya yang tidak tertangani terkait kesehatan hama Penyakit Ikan	4	4	16	Ada	Telah dibentuk Tim Pengendali Hama Penyakit Ikan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah No. 523.6/53/1 Tahun 2022 serta sosialisasi pencegahan dan penanganan Hama Penyakit Ikan kepada masyarakat/pelaku usaha budidaya perikanan	Memadai	3	3	9
Target penerbitan Sertifikat Analisis Test tidak terpenuhi	3	3	9	Ada	Terus melakukan pemeliharaan ruang lingkup pengujian yang sudah terakreditasi (20 parameter)	Memadai	3	2	6
peralatan pengujian tidak bisa beroperasi dengan laik	3	4	12	Ada	Terus Updating teknologi peralatan laboratorium	Belum Memadai	3	3	9
Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan pengujian	3	4	12	Ada	Pengajuan Surat Rekomendasi Penggunaan Media dengan TKDN 0%	Memadai	2	3	6
Pelayanan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai standar	3	3	9	Ada	Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana prioritas	Memadai	2	2	4
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi di Loka PBI Karimun Jawa	3	5	15	Ada	Perbaiki Sarana dan Prasarana Produksi	Memadai	2	5	10
Turunnya Produksi Benih Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	3	5	15	Ada	Melakukan Peremajaan Calon Induk Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya Sarana dan Prasarana Revitalisasi Tambak Dinas DKP Prov. Jateng di Kab Jepara dalam rangka Modelling Pembenuhan Ikan Nila Salin	3	5	15	Ada	Dilakukan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Tambak Dinas Untuk Memproduksi Benih Ikan Nila Salin	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ambarawa	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Randudongkal	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Singasari	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Tambaksogra	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Janti	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Muntilan	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Maribaya	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Sluke	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ngrajek	3	5	15	Ada	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potensi penurunan kualitas pelayanan adminstrasi umum daerah	3	2	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Potensi laporan penyediaan jasa dan kegiatan yang kurang rapi	3	2	6	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Pemanfaatan BMD kurang optimal	3	2	6	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal agar perawatan kendaraan dinas dan BMD lainnya bisa secara rutin	Memadai	2	2	4
Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	4	4	16	Ada	Membantu dan mendampingi nelayan yang kesulitan dalam pengurusan perijinan kapal secara online	Belum Memadai	3	4	12
Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan anggaran perbaikan akses jalan masuk ke kawasan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan anggaran pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan untuk mengurangi sedimentasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan anggaran penyusunan dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan anggaran penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	6
Biaya pengeluaran yang tidak terduga dari belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	6
Aset barang milik daerah yang semakin rusak	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang milik daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	6
Tingkat pelanggaran sektor pemanfaatan sumberdaya perikanan masih cukup tinggi	4	3	12	Ada	optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak Mengetahui Peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	memberikan kegiatan pemahaman peraturan periundang undangan yang berlaku	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak mengetahui undang-undang	4	3	12	Ada	memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha	Memadai	3	2	6
Masih banyaknya masyarakat atau pelaku usaha belum mengetahui peraturan perundang undangan	4	3	12	Ada	dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir	4	2	8	Ada	'Melakukan kajian usulan lokasi kawasan konservasi secara detail dan komprehensif dengan melibatkan pakar dan praktisi konservasi	Memadai	2	1	2
Pengelolaan ruang laut menjadi tidak optimal	4	2	8	Ada	'Sosialisasi RTRWP dan berkolaborasi dengan instansi terkait pengawasan pemanfaatan ruang laut	Memadai	2	1	2
Petambak garam menghasilkan garam tidak sesuai standar	3	3	9	Ada	Melakukan pembinaan terhadap perwakilan petambak garam	Memadai	2	2	4
Masyarakat pesisir tidak terampil dalam pengelolaan keuangan baik kelompok maupun perorangan	3	3	9	Ada	Memberikan pembinaan dan pelatihan finansial	Memadai	2	2	4
Adanya praktek suap dan pengaturan penyedia	3	2	6	Ada	Proses penentuan vendor dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi	Memadai	1	2	2
Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	3	2	6	Ada	melakukan verifikasi kelompok calon penerima bantuan bersama-sama dengan Dinas kabupaten/kota terkait	Memadai	1	2	2
Pembudidaya ikan belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar	4	3	12	Ada	Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Memadai	4	2	8
Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	3	3	9	Ada	Verifikasi calon penerima bantuan secara berjenjang	Memadai	3	2	6
Pembudidaya masih menerapkan sistem budidaya tradisional (sederhana)	4	3	12	Ada	Pemberian bantuan berupa penunjang teknologi kepada pembudidaya ikan	Memadai	4	2	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Data Produksi Olahan Hasil Perikanan tidak akurat	4	3	12	Ada	Sosialisasi dan Validasi data statistik olahan hasil perikanan	Memadai	3	2	6
Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	4	3	12	Ada	Memfasilitasi kegiatan bagi pelaku usaha berupa pelatihan diversifikasi produk, jejaring pemasaran, dsb	Memadai	3	3	9
Penyediaan dan penyaluran bahan baku bagi industri pengolahan ikan tidak optimal	4	3	12	Ada	Fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah)	Memadai	3	3	9
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	4	4	16	Ada	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrim, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Memadai	4	3	12
Lokasi kegiatan penanaman mangrove belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	4	3	12	Ada	1. Berkoordinasi antar Instansi pemerintah dan kelompok masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan penanaman mangrove, 2. Survei lapangan untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	4	4	16	Ada	1. Sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkaitan, 2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan, 3. Penguatan kegiatan pengawasan di kawasan konservasi	Memadai	3	3	9
Keselamatan petugas pada saat survei/ monitoring di lapangan	4	4	16	Ada	1. Pemantauan/mencari informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Memadai	3	4	12
Tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	4	4	16	Ada	Melaksanakan penanganan tindak lanjut pelanggaran secara cermat dan tepat serta memberikan sanksi sesuai aturan	Belum Memadai	3	3	9
Belum optimalnya penerapan sanksi administrasi terutama denda administrasi sebagai efek jera terhadap tindak lanjut pelanggaran	4	3	12	Ada	Meningkatkan kerjasama dengan Petugas yang berwenangan (Polsus PWP3K dan Petugas berwenang lainnya) dalam upaya penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah hingga sanksi denda untuk memberikan efek jera hingga tersedianya aturan sesuai kewenangan Provinsi	Memadai	3	3	9
Belum optimalnya frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang diawasi	4	4	16	Ada	Manajemen peningkatan frekuensi operasi sesuai objek dan urgensi guna optimalisasi penggunaan biaya operasi	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendahnya tingkat penerbitan HPK dan SLO Kapal perikanan Kewenangan Provinsi	4	3	12	Ada	Peningkatan pemantauan dan penyadartahuan di Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan terkait kewajiban untuk melakukan pengajuan HPK dan SLO bagi kapal ukuran 6-30 GT kapal perikanan kewenangan provinsi	Memadai	3	3	9
Kurang terpenuhinya sarana Peralatan dan perlengkapan kantor	2	3	6	Ada	1. Melakukan perencanaan yang matang dan detail untuk seluruh kebutuhan penunjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai. 2.Melaksanakan koordinasi komperhensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Induk Instansi terkait perlunya penambahan anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belum Memadai	2	4	8
Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dan internet dalam 1 tahun	3	3	9	Ada	Melakukan perencanaan yang matang dan detail untuk seluruh kebutuhan jasa penunjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai.	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya kenaikan tarif pajak kendaraan dan Terlambatnya proses pemeliharaan yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kegiatan	3	3	9	Ada	Melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin sesuai jadwal yang ditentukan, membuat SOP yang jelas untuk setiap jenis pemeliharaan, Penambahan anggaran pemeliharaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan.	Memadai	3	3	9
gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca Ekstrim	3	4	12	Ada	kehati-hatian dalam penggunaan gedung kantor dengan memperhatikan keselamatn kerja	Belum Memadai	3	4	12
Mangrove yang ditanam mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	3	3	9	Ada	Survei untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	2	2	4
Tindak lanjut pelanggaran pelaku usaha tidak terselesaikan	1	2	2	Ada	Peningkatan kompetensi petugas	Belum Memadai	1	2	2
Menurunnya intensitas operasi pengawasan SDKP dengan speedboat	2	2	4	Ada	Penambahan anggaran operasional operasi dan pemeliharaan speedboat	Belum Memadai	2	2	4
Jumlah HPK dan SLO yang diterbitkan tidak mencapai target	2	4	8	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	4	8
Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	2	3	6	Ada	Penyusunan rencana anggaran pembelian barang disesuaikan dengan harga barang pada aplikasi GO	Memadai	1	1	1
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	2	3	6	Ada	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan anggaran tarif listriknya	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	6	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan	Memadai	1	3	3
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	4	4	16	Ada	Meningkatkan kualitas SDM pengelola dalam pengelolaan kawasan konservasi	Memadai	4	3	12
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	9	Ada	Mengikuti pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	4
Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	2	3	6	Ada	Menggunakan Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat untuk menangani perkara sektor kelautan dan perikanan	Memadai	2	2	4
Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan bersama instansi terkait (PSDKP) di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Memadai	3	2	6
Keterbatasan SDM Pengawas Perikanan	3	3	9	Belum Ada	-	Belum Memadai	3	3	9
Pelayanan administrasi umum rendah	2	2	4	Ada	Evaluasi atas implementasi atas Standar Pelayanan, SOP yang terjabarkan dibawah Koordinasi Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	Memadai	2	2	4
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2	3	6	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	2	3	6	Ada	Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengecekan rutin kendaraan dinas operasional	Belum Memadai	2	3	6

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

Tabel 3

Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
PROGRAM				
pelayanan kepelabuhan tidak maksimal	12	Kepala PPP Lohgending	Tidak tersedianya sapras dan pelayanan yang kurang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi Loka PBI Karimunjawa	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan
Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi
Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi
KEGIATAN				
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	12	Kepala PPN Tegalsari	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum
kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong seperti fasilitas untuk Tambat dan labuh Kapal Nelayan	12	PPP Asemdayong	Sedimentasi di kawasan dermaga pelabuhan dan muara Sungai	Kapal-kapal tidak dapat merapat ke dermaga dan kapasitas dermaga kurang maksimal untuk menampung jumlah kapal yang tambat di pelabuhan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong, seperti Drainase yang rusak parah dan kebersihan kawasan PPP Asemdayong masih banyak yang kumuh	16	PPP Asemdayong	Kerusakan parah drainase di kawasan pelabuhan, dan Sampah yang menumpuk di kawasan Pelabuhan	Saluran pembuangan air tidak lancar, dan Lingkungan menjadi kotor dan berbau,
Keterlambatan Pemeliharaan BMD	12	PPP Asemdayong	Terbatasnya jumlah anggaran pemeliharaan yang terbilang sangat minim	keterlambatan pemeliharaan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas barang milik daerah.
Risiko rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	12	Kepala PPP Wonokerto, Nelayan/pemilik kapal, masyarakat di kawasan PPP Wonokerto	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kawasan PPP Wonokerto, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman nelayan/pemilik kapal mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan kapal	kerugian ekonomi, kecelakaan kerja yang fatal, peningkatan biaya operasional, penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan citra buruk pelabuhan
Risiko tidak terbitnya dokumen kapal perikanan berupa STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Berlayar (PB) yang dapat menghambat operasional kapal dan menurunkan kepatuhan administrasi pelabuhan.	12	Kepala PPP Wonokerto	Masih banyaknya kapal perikanan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) tidak ramah lingkungan	Tidak terbitnya STBL Kedatangan Kapal dan PB
Risiko kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	12	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaa API ramah lingkungan	Jika ada patroli pengawasan maka akan tertangkap
Risiko banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	12	Kepala PPP Wonokerto	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas kepelabuhanan tidak dapat dimanfaatkan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pelaku usaha memperluas lahan yang disewa tanpa ijin Kepala Pelabuhan	12	Kepala PPN Tasikagung	Kurangnya pengawasan di lapangan	Kehilangan potensi PAD
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan wilayah kerja operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	Kepala PPP Lohgending	kurangnya sapras (fasilitas pokok, penunjang, fungsional) yang memadai dalam pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan dan kejelasan batas wilayah kerja operasional pelabuhan, adanya bangunan liar di kawasan pelabuhan	Pengawasan operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor
Kapal nelayan yang beroperasi tidak memiliki dokumen yang lengkap	12	Kepala PPP Lohgending	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya kelengkapan dokumen yang dimiliki	Nelayan tidak terlindungi secara hukum dan asuransi, nelayan terhambat dalam mengakses bantuan dari pemerintah
Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	12	Kasubbag TU	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi di Loka PBI Karimunjawa	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Turunnya Produksi Benih Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	10	Kepala BPPB Kelas A	Turunnya Produktifitas Induk Ikan Endemik di Loka PBI Ngrajek	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Sarana dan Prasarana Revitalisasi Tambak Dinas DKP Prov. Jateng di Kab Jepara dalam rangka Modelling Pembenihan Ikan Nila Salin	10	Kepala BPPB Kelas A	Sarana dan Prasarana kurang memenuhi standar untuk memproduksi benih ikan Nila Salin	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ambarawa	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Randudongkal	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Singasari	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Tambaksogra	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Janti	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Muntilan	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Maribaya	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Sluke	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan udang	target produksi ikan tidak tercapai
Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ngrajek	10	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai
Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku
Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan
Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan
Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	12	1. Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi, dan Perizinan 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang
Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	12	1. Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi, dan Perizinan 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja/Kematian
gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca Ekstrim	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Genteng dan plafon mulai bocor 2. Tembok bangunan mulai retak 3. pagar dan komponen kusen material besi dan baja kerosok	1. Dampaknya kinerja karyawan terhambat 2. keselamatan jiwa karyawan bisa terancam

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	pelayanan kepelabuhan tidak maksimal	12	Tidak tersedianya sapas dan pelayanan yang kurang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	peningkatan pelayanan serta sarpras penunjang pelayanan, Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala PPP Logending	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi Loka PBI Karimunjawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana Produksi	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak	12	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	12	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	Menugaskan SDM yang ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan untuk menambah kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan pelabuhan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	12	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	Melakukan pemberian teguran, peringatan, dan sanksi berupa pembongkaran lahan bagi penyewa lahan yang melanggar peraturan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi	Pemantauan dan pendampingan pada saat pelaksanaan penanaman mangrove	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Survei lokasi sebelum dilakukan penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	12	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	Sosialisasi dan monitoring serta evaluasi thd kepatuhan pelaku usaha	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong seperti fasilitas untuk Tambat dan labuh Kapal Nelayan	12	Sedimentasi di kawasan dermaga pelabuhan dan muara Sungai	Kapal-kapal tidak dapat merapat ke dermaga dan kapasitas dermaga kurang maksimal untuk menampung jumlah kapal yang tambat di pelabuhan	Mengusulkan perbaikan Fasilitas Pokok atau Fasilitas Fungsional	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	kurangnya fasilitas pokok, fungsional, atau penunjang yang dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional di PPP Asemdayong, seperti Drainase yang rusak parah dan kebersihan kawasan PPP Asemdayong masih banyak yang kumuh	16	Kerusakan parah drainase di kawasan pelabuhan, dan Sampah yang menumpuk di kawasan Pelabuhan	Saluran pembuangan air tidak lancar, dan Lingkungan menjadi kotor dan berbau,	Mengusulkan upaya perbaikan drainase kawasan pelabuhan dan mengusulkan jasa tenaga kebersihan kawasan pelabuhan	Kepala Pelabuhan	Desember 2027
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan Pemeliharaan BMD	12	Terbatasnya jumlah anggaran pemeliharaan yang terbilang sangat minim	keterlambatan pemeliharaan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas barang milik daerah.	Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan prioritasnya untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan pada waktu yang tepat.	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Risiko rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	12	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kawasan PPP Wonokerto, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman nelayan/pemilik kapal mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan kapal	kerugian ekonomi, kecelakaan kerja yang fatal, peningkatan biaya operasional, penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan citra buruk pelabuhan	1. Meningkatkan edukasi dan pelatihan keselamatan kerja bagi nelayan, buruh, dan pemilik kapal secara rutin. 2. Menambah fasilitas keselamatan dan keamanan, seperti jalur evakuasi, APAR, dan sistem peringatan dini. 3. Membangun koordinasi lintas sektor (UPTD PPP, TNI AL, Polair, Dinas Kesehatan, dan masyarakat nelayan). 4. Menerapkan SOP keselamatan pelabuhan secara ketat dengan pengawasan rutin. 5. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital (CCTV, aplikasi laporan cepat) untuk memantau kondisi	Kepala PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko tidak terbitnya dokumen kapal perikanan berupa STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Belayar (PB) yang dapat menghambat operasional kapal dan menurunkan kepatuhan administrasi pelabuhan.	12	Masih banyaknya kapal perikanan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) tidak ramah lingkungan	Tidak terbitnya STBL Kedatangan Kapal dan PB	Kolaborasi dengan: 1. Syahbandar Perikanan : menertibkan dokumen kapal perikanan; 2. Petugas kesyahbandaran dan pengawas perikanan: menertibkan kelengkapan dokumen administrasi kapal perikanan dan menjaga keselamatan pelayaran kapal perikanan	Kepala PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Risiko kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	12	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaa API ramah lingkungan	Jika ada patroli pengawasan maka akan tertangkap	Kolaborasi dengan: 1. PSDKP (Pekalongan dan CDK Wil. Barat); melakukan patroli pengawasan bersama; 2. Sat POLAIRUD Pekalongan : melakukan penindakan kapal perikanan yang melanggar peraturan; 3. Posal Wonokerto : melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan	Kepala PPP Wonokerto	paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	12	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas kepelabuhanan tidak dapat dimanfaatkan	Kolaborasi dengan: 1. BPKAD Prov. Jateng : penghapusan aset mangkrak; 2. DKP Prov. Jateng : pembangunan kembali aset yang telah dihapuskan	Kalabuh PPP Wonokerto	Paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan evaluasi capaian dilakukan secara periodik setiap semester untuk memastikan peningkatan ketercapaian pelayanan kepelabuhanan secara berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Pelaku usaha memperluas lahan yang disewa tanpa ijin Kepala Pelabuhan	12	Kurangnya pengawasan di lapangan	Kehilangan potensi PAD	Bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi untuk engeksekusi lahan-lahan yang dimanfaatkan secara ilegal	Kepala PPN Tasikagung	Semester 1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan wilayah kerja operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	kurangnya sapras (fasilitas pokok, penunjang, fungsional) yang memadai dalam pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan dan kejelasan batas wilayah kerja operasional pelabuhan, adanya bangunan liar di kawasan pelabuhan	Pengawasan operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	Pembangunan gedung pengawasan SAR, Rehabilitasi tempat istirahat nelayan, Review masterplan Pelabuhan, Ukur ulang batas tanah kawasan pelabuhan	Kepala PPP Logending	Desember

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Kapal nelayan yang beroperasi tidak memiliki dokumen yang lengkap	12	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya kelengkapan dokumen yang dimiliki	Nelayan tidak terlindungi secara hukum dan asuransi, nelayan terhambat dalam mengakses bantuan dari pemerintah	Sosialisasi serta rembug gayeng stake holder	Kepala PPP Logending	Desember
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	12	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Kasubag TU	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Produksi di Loka PBI Karimunjawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana Produksi	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya Produksi Benih Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	10	Turunnya Produktifitas Induk Ikan Endemik di Loka PBI Ngrajek	target produksi ikan tidak tercapai	Melakukan Peremajaan Calon Induk Ikan Endemik Lokal di Loka PBI Ngrajek	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Sarana dan Prasarana Revitalisasi Tambak Dinas DKP Prov. Jateng di Kab Jepara dalam rangka Modelling Pembenihan Ikan Nila Salin	10	Sarana dan Prasarana kurang memenuhi standar untuk memproduksi benih ikan Nila Salin	target produksi ikan tidak tercapai	Dilakukan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Tambak Dinas Untuk Memproduksi Benih Ikan Nila Salin	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ambarawa	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Randudongkal	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Singasari	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Tambaksogra	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Janti	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Muntilan	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Maribaya	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Sluke	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan udang	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya Kerusakan Sarana dan Prasarana Loka PBI Ngrajek	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	12	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Mengajukan untuk diadakan kegiatan pengawasan dan penertiban nelayan di laut oleh instansi yang berwenang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	12	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	Menetapkan perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	12	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	Menetapkan pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	12	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Menetapkan penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	12	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrim, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2026
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	12	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja/Kematian	1. Pemantauan/mencari informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2026

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca Ekstrim	12	1. Genteng dan plafon mulai bocor 2. Tembok bangunan mulai retak 3. pagar dan komponen kusen material besi dan baja keropos	1. Dampaknya kinerja karyawan terhambat 2. keselamatan jiwa karyawan bisa terancam	1. menyusun RAB pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung kantor 2. berkoordinasi dengan subag Umum DKP	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2 bulan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	12	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA	Melakukan monitoring target biofisik dikawasan konservasi	Kepala cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun